



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LKj 2020



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

**PADANG, JANUARI 2021
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 di sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2020.

Selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik ditahun mendatang.





Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi dibidang Kehutanan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, LKj Tahun Anggaran 2020 ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Januari 2021
Kepala Dinas Kehutanan



YOZARFI ARDI U.P. S.Hut. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas sepuluh yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana pada RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Untuk mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan di atas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Visi Gubernur Sumatera Barat yang secara sistematis tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 “Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera” dan Misi 5 Gubernur Sumatera Barat yaitu “Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan Serta Berwawasan Lingkungan”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat di atas maka di tetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun (2016-2021) sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis:

1. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
2. Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat
3. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai dengan 12 program dan 144 kegiatan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah 107,23% yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pencapaian IKU Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Kode
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100	
		Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	84%	82.96%	98.76	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I					99.38	
2.	Menurunnya laju kerusakan hutan	Persentase penurunan luas kerusakan hutan	14%	14.73%	105.28	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi II					105.28	
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	18.03%	21.59%	119.74	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi III					119.74	
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	A	104.53	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi IV					104.53	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I s/d IV					107,23	

Indikator *outcome* yang ditargetkan pada Tahun 2020 adalah indikator Kinerja Utama (IKU), berupa indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Capaian IKU Tahun 2020 selanjutnya digunakan untuk menilai capaian Sasaran Strategis Tahun 2020. Pencapaian Sasaran Strategis pada Tahun 2020 yang didukung capaian IKU (*outcome*) adalah sebagaimana digambarkan dalam Tabel di atas dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis “Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan” Tahun 2020 sebesar 99,38% diukur melalui capaian 2 (dua) IKU.
2. Capaian sasaran strategis “Menurunnya laju kerusakan hutan” Tahun 2020 sebesar 105,28% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.
3. Capaian sasaran strategis “Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat” tahun 2019 sebesar 119,74% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya tata kelola organisasi” Tahun 2020 sebesar 104,54% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.



Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2020 dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak terealisasi 100% dan tepat waktu (terlambat), yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat diminimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Struktur Organisasi.....	3
1.5 Aspek Strategis.....	7
1.6 Analisis Perkembangan Strategis	10
1.6.1 Kondisi Saat Ini	10
1.6.2 Kondisi yang Diharapkan	14
1.7 Peningkatan Sistem Akip dan Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	15
1.8 Sistematika Penyajian.....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	19
2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	19
2.2 Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	33
2.4 Rencana Kinerja Sasaran	34
2.5 Rencana Kinerja Kegiatan.....	36
2.6 Rencana Anggaran Tahun 2020	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	47
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	48
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	51
BAB IV PENUTUP.....	144
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ...	iv
Tabel 2. Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan Tahun 2016-2021.....	10
Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2016-2021	22
Tabel 4. Langkah-Langkah Strategis Pencapaian Sasaran	23
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.....	34
Tabel 6. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.....	35
Tabel 7. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2020	36
Tabel 8. Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2020.....	44
Tabel 9. Alokasi Dana per Sasaran Tahun Anggaran 2020 dan 2019	45
Tabel. 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	48
Tabel. 11. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ...	49
Tabel 12. Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2020	52
Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 dan Tahun 2019	52
Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	54
Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	55
Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara.....	56
Tabel 17. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis I Tahun 2020	59
Tabel 18. Capaian Target IKU Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya per Triwulan Tahun 2020.....	65
Tabel 19. Hasil Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat	66
Tabel 20. Capaian Target IKU Nilai PNBPN Sektor Kehutanan per Triwulan Tahun 2020	72



Tabel 21.	Target dan Realisasi PNPB Sektor Kehutanan di Sumatera Barat Tahun 2020	73
Tabel 22.	Pencapaian Kinerja Sasaran Menurunnya Laju Kerusakan Hutan Tahun 2020.....	76
Tabel 23.	Perbandingan Capaian Kinerja Menurunnya Laju Kerusakan Hutan Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	77
Tabel 24.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	78
Tabel 25.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78
Tabel 26.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara	80
Tabel 27.	Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Menurunnya laju kerusakan hutan Tahun 2020	83
Tabel 28.	Capaian Target IKU Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan per Triwulan Tahun 2020	90
Tabel 29.	Tutupan Lahan Kawasan Hutan (Ha) Tahun 2017 hingga Tahun 2020....	90
Tabel 30.	Hasil Evaluasi Tanaman Tahun N-5	92
Tabel 31.	Jumlah Kelompok Lembaga Masyarakat Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari hingga Tahun 2019 di Sumatera Barat	93
Tabel 32.	Pencapaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2020	96
Tabel 33.	Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2020 dan Tahun 2019	97
Tabel 34.	Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan sampai dengan Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	98
Tabel 35.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	98
Tabel 36.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan di Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara	99
Tabel 37.	Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3 Tahun 2020.....	102
Tabel 38.	Capaian Target IKU Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat per Triwulan Tahun 2020.....	106
Tabel 39.	Rekapitulasi Luas Areal Kelola Perhutanan Sosial	107



Tabel 40.	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2020	114
Tabel 41.	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019.	115
Tabel 42.	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	116
Tabel 43.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara	116
Tabel 44.	Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 4 Tahun 2020	118
Tabel 45.	Capaian Target IKU Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja per Triwulan Tahun 2020.....	122
Tabel 46.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Enam Tahun Terakhir	122
Tabel 47.	Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	123
Tabel 48.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020	146





DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	7
Gambar 2. Tujuan dan Sasaran Strategis I	51
Gambar 3. Realisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) Tahun 2016 - 2020	53
Gambar 4. Capaian Kinerja Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) Tahun 2016-2020	53
Gambar 5. Realisasi Nilai PNBPN Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016 – 2020.....	54
Gambar 6. Capaian kinerja Nilai PNBPN Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016 – 2020	54
Gambar 7. Tujuan, Sasaran Strategis 2, dan Indikator Kinerja Utama 3.....	75
Gambar 8. Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan (%) Tahun 2017-2020	77
Gambar 9. Capaian Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan Tahun 2017-2020	77
Gambar 10. Perbandingan Skenario Target Penurunan Laju Kerusakan Hutan dengan Laju Kerusakan Hutan yang terjadi (ha/tahun)	91
Gambar 11. Skenario dan Realisasi <i>Hotspot</i> Tahun 2015 – 2019.....	95
Gambar 12. Tujuan dan Sasaran Strategis 3	96
Gambar 13. Realisasi Kinerja Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan (%) Tahun 2016-2020.....	97
Gambar 14. Capaian Kinerja Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan (5) Tahun 2016-2019	98
Gambar 15. Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Sembilan Tahun Terakhir	107
Gambar 16. Penyerahan Penghargaan Kalpataru Tahun 2020	112
Gambar 17. Tujuan dan Sasaran Strategis 4	114
Gambar 18. Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas (%) Tahun 2015 s.d Tahun 2019	115
Gambar 19. Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019	115



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja SKPD

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf

Lampiran 3. Certificate ISO 9001:2015

Lampiran 4. Rencana Aksi

Lampiran 5. Realisasi Rencana Aksi

Lampiran 6. Indikator Kinerja Individu





BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Setiap Kepala SKPD diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan kinerja pemerintah khususnya laporan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020. Ikhtisar perjanjian kinerja tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, yang didanai dari APBD maupun sumber dana lainnya.

Laporan kinerja ini menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020. Hasil yang telah diperoleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu satu tahun tersebut merupakan bagian dari kontribusi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan pembangunan kehutanan dan pembangunan Sumatera Barat dalam mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dan penyampaian laporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja secara ringkas, lengkap dan terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Dengan demikian, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengkomunikasikan dan menjawab





tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya melalui pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang berkaitan dengan mandat yang diterima Dinas Kehutanan dari Gubernur Sumatera Barat.

Selain itu, penyampaian laporan kinerja kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan kinerja ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi; dan
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

1.3 KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;



- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan, lingkup Provinsi Sumatera Barat;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang sekretariat dinas, perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan, dan penyuluhan dan perhutanan sosial;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kehutanan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Secara kelembagaan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat Eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Unsur pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi. Dalam perkembangannya sesuai kebutuhan organisasi, struktur dinas mengalami penambahan Eselon III dan IV sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Peraturan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas dijabat oleh Yozarwardi.UP, S.Hut, M.Si
2. Sekretaris dijabat oleh Dr.Ferdinal Asmin,S.TP,MP yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dijabat oleh Jefri Chandra, SP
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dijabat oleh Nensi, SE.AK
 - c. Kepala Sub Bagian Program Anggaran dijabat oleh (Plt.) Muhdian Prasetya D, S.Hut, M.Si
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Faridil Afrasy, S.Hut, MM yang membawahi:





- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan dijabat oleh Sayogo Hutomo, S.Hut, MP
 - b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dijabat oleh Syamsul Bahri, S.Hut, M.Si
 - c. Kepala Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan dijabat oleh (Plt.) Sayogo Hutomo, S.Hut, MP
4. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dijabat oleh Bambang Suyono, S.Hut, MM yang membawahi:
- a. Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dijabat oleh Zarmawandi, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dijabat oleh Afrial Muhammad, S.Pt, M.Si
 - c. Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dijabat oleh Era Sulatri, S.Hut, M.Si
5. Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE dijabat oleh Ir. Mgo Senatung, MP yang membawahi:
- a. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan dijabat oleh Syamsul Bahary, S.IP
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dijabat oleh Dudi Badrudin, S.Hut.T
 - c. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dijabat oleh Muhdian Prasetya.D, S.Hut, M.Si
6. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat dijabat oleh Yonefis SH, MM yang membawahi:
- a. Kepala Seksi Penyuluhan dijabat oleh Boy Martin, S.H, M.Si
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Almen, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Hutan Adat dan Kemitraan dijabat oleh Tito Trio Putra, S.Hut, M.Si
7. Kepala UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan dijabat oleh Febrina Trisusila Putri, SP, M.Si yang membawahi:
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Imran, SE
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Benih dijabat oleh Rini Hasmira, S.H
 - c. Kepala Seksi Informasi dan Peredaran Benih dijabat oleh Mika Lestaria, S.Hut, M.Si



8. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan dijabat oleh Kusworo, SP.M.Si yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Fazul Taufik, ST, M.Eng
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Zeptin Alex Vildiro, S.Hut, MM
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Cucu Sukarna, S.IP
9. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pasaman Raya yang dijabat oleh Yandesman, S.Hut yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Rizky Hamid Nasution, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Hendri Dunan, SH
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Yuhan Sahri, S.Hut.
10. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota yang dijabat oleh (Plt) Bambang Suyono, S.Hut, MM yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Susi Erienti, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Ismet Fanani, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Yogi Wandra, S.Hut
11. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Agam Raya yang dijabat oleh Ir. Afniwirman yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Dewi Safnita, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Yon Fredy, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Suhet Tarmizi, SP
12. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sijunjung yang dijabat oleh Terra Dharma, S.Hut, M.Si yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Dian Yulia Widra, S.Hut.T
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Febri Syahli, S.Hut, M.Sc
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh (Plt) Dian Yulia Widra, S.Hut.T

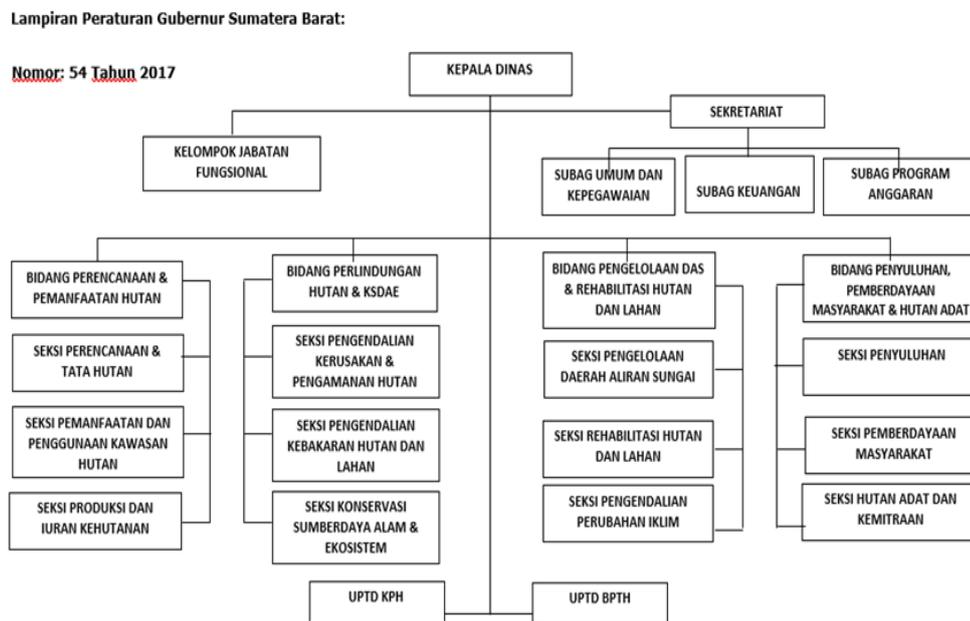




13. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Solok yang dijabat oleh Ir. Refriasel yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Novi Eka Putri, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Bakhrinaldi, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Hendra Bakti Putra, ST
14. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Batang Hari yang dijabat oleh Hamdani, S.Sos yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Hasan, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Joni Saputra, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Muhammad Fitriadi, S.Hut
15. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pesisir Selatan yang dijabat oleh Madrianto, S.Hut yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Yusfiandrita, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Andre Das Gomes, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Hendrio Fadly, S.Hut
16. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dharmasraya yang dijabat oleh (Plt) Yonefis, SH, MM yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Ir. Evi Yusri, M.Si
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Habibullah, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Fetrinelfa, S.Hut
17. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mentawai yang dijabat oleh Tasliatul Fuaddi, S.Hut yang membawahi:
 - a. Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Zunaidi, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Pribel Sirait, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Riza Nofa Satria, S.Hut, M.Si



Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Sumber: Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

1.5 ASPEK STRATEGIS

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan di Sumatera Barat. Adapun peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Pemantapan kawasan hutan melalui proses percepatan penyelesaian RTRW substansi kehutanan dan penyiapan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim melalui upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jumlah *hotspot* dan luas areal yang terbakar, koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi dan pemantauan efek gas rumah kaca, penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Meningkatkan pengamanan hutan, pencegahan dan penanganan *illegal logging* melalui pemantapan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli dan operasi serta penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan,



serta peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN).

4. Melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan (sipil teknis dan vegetatif), diarahkan kepada peningkatan ketahanan daya dukung air dan tanah, utamanya pengelolaan dan operasionalisasi KPHL serta pengelolaan hutan rakyat.
5. Meningkatkan sumbangan pendapatan daerah dan PNBPN dari hutan produksi melalui optimalisasi produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta ekspor melalui perbaikan perizinan, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), penataan industri, pengelolaan dan operasionalisasi KPHP.
6. Percepatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui perhutanan sosial sebagai implementasi spirit keberpihakan pengelolaan hutan dengan melibatkan peran masyarakat dengan upaya peningkatan modal sosial dalam mendukung penyelesaian konflik dan hutan adat, peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan menghubungkannya dengan kemitraan.
7. Peningkatan tata kelola organisasi dengan mengimplementasikan ISO 9001:2015 dan melaksanakan seluruh kegiatan lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh masing-masing unit kerja. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran juga merupakan upaya percepatan peningkatan tata kelola organisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, telah ditetapkan sepuluh prioritas pembangunan yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;



5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur dan;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung agenda Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang kesepuluh yaitu **“Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana”**.

Dukungan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian dimaksud dilakukan melalui 12 Program yaitu:

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,
2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan,
3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan,
4. Program Pemantapan Kawasan Hutan,
5. Program Perhutanan Sosial,
6. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan,
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Secara detail kaitan antara RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan Tahun 2016-2021.

Misi	Prioritas	Tujuan	Sasaran Perubahan RPJMD	Sasaran Berdasarkan Rekomendasi Tim Penguatan Sakip Melalui Surat Keputusan Gubernur	Program
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	3. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan. 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan. 4. Program Pemantapan Kawasan Hutan. 5. Program Perhutanan Sosial. 6. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

1.6 ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, mencakup kawasan hutan, sensitivitas kehutanan, penanganan *illegal logging*, rehabilitasi hutan dan lahan, pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan dan optimalisasi pemanfaatan hasil dan industri kehutanan. Hal ini menjadi pertimbangan bagi keberlanjutan pembangunan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di Provinsi Sumatera Barat. Penilaian atas kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

1.6.1 Kondisi Saat ini

1.6.1.1 Ekologi

Kawasan hutan secara ekologis memiliki peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, berfungsi sebagai penyangga sumber kehidupan, pengatur tata air, ekosistem dan menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar, sebagaimana dirubah dengan Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Nomor SK.8089/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2017, secara keseluruhan Provinsi Sumatera Barat memiliki Kawasan Hutan seluas $\pm 2.286.883,10$ Ha (54,07%) dari luas wilayah $\pm 4.229.730,00$ Ha yang terdiri atas :

- ✓ Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas $\pm 765.623,24$ Ha
- ✓ Hutan Lindung (HL) seluas $\pm 775.304,94$ Ha
- ✓ Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas seluas $\pm 228.665,68$ Ha
- ✓ Hutan Produksi (HP) seluas $\pm 357.088,97$ Ha
- ✓ Hutan Produksi Konservasi (HPK) seluas $\pm 160.200,27$ Ha,
- ✓ Areal Penggunaan Lain (APL) seluas $\pm 1.942.846,90$ Ha,

Melihat komposisi tersebut di atas, kawasan hutan Sumatera Barat didominasi oleh kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam dan hutan lindung yang terhampar di pinggang Bukit Barisan yang merupakan hulu-hulu sungai yang bermuara ke provinsi tetangga (Jambi dan Riau), dengan kondisi fisik bertopografi sedang hingga berat, kontur bergelombang sebagai habitat berbagai jenis vegetasi perdu hingga pohon-pohonan dan berbagai jenis satwa.

Sebagai salah satu sumber daya produktif, kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat juga menjadi sumber-sumber penghidupan masyarakat sekitar hutan yang perlu dikembangkan dalam kerangka Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Hal ini telah dibuktikan dengan dijadikannya Provinsi Sumatera Barat sebagai model pengembangan Perhutanan Sosial (PS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perhutanan Sosial juga dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah pemangkuan lahan (tenurial) yang banyak terjadi pada hampir seluruh kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Alih fungsi lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan kegiatan pembangunan lainnya di luar bidang kehutanan juga menambah kompleksitas masalah tenurial di Sumatera Barat. Di sisi lain, kepastian batas kawasan hutan perlu dimantapkan agar mendapatkan kesepahaman bersama antar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena dampak dari alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi dapat mengancam kelestarian hutan.

Di samping itu, bidang kehutanan masih menjadi isu sensitif baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Tingginya perhatian multipihak terhadap pengelolaan hutan berpotensi menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak,





apalagi berkaitan dengan “*miss management*” dan “*conflict of interest*”. Untuk itu, pengelolaan hutan harus dikelola secara holistik dan integral.

1.6.1.2 Sosial/Ekonomi

Ketentuan terkait penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan sudah cukup banyak dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari ketentuan yang ada, pada dasarnya penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip dasar penggunaan dan pemanfaatan hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan fasilitasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan nasional/daerah. Provinsi Sumatera Barat dengan kawasan hutan yang luas, memiliki peluang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dimungkinkan dari ketentuan pengelolaan hutan, seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Hutan Adat (HA), Kemitraan Kehutanan (KK), Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, dan lain-lain sudah mulai digalakkan di Provinsi Sumatera Barat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan-tekanan terhadap kawasan hutan.

Pemanfaatan hutan bertujuan memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Saat ini, pemanfaatan hasil hutan kayu di Provinsi Sumatera Barat diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 8 (delapan) perusahaan yang terdiri atas 4 (empat) IUPHHK-HA dan 4 (empat) IUPHHK-HT. Untuk itu, pembinaan yang terus-menerus dari Dinas Kehutanan diperlukan agar prinsip kelestarian produksi dan kelestarian sumber daya hutan dalam pelaksanaan IUPHHK dapat tercapai.

Kebutuhan masyarakat akan bahan bangunan, seperti kayu, ikut mendorong tumbuhnya industri hasil hutan berupa Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)/*Sawmill*. Akibat kapasitas industri pengolahan kayu yang tidak disertai dengan kemampuan suplai bahan baku secara lestari berpotensi memicu peningkatan kasus penebangan liar, penyerobotan lahan, dan pengambilan hasil hutan secara ilegal yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.



1.6.1.3 Kelembagaan

Penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 395 orang dengan status kepegawaian 392 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan rincian:

1. Sekretariat: 29 orang
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan: 17 orang
3. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat: 13 orang
4. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE: 25 orang
5. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL: 15 orang
6. UPTD BSPTH: 10 orang
7. UPTD KPHL BB: 59 orang
8. UPTD KPHL Agam Raya: 25 orang
9. UPTD KPHL 50 Kota: 35 orang
10. UPTD KPHP Dharmasraya: 17 orang
11. UPTD KPHP Mentawai: 15 orang
12. UPTD KPHP Pesisir Selatan: 20 orang
13. UPTD KPHL Pasaman Raya: 35 orang
14. UPTD KPHL Sijunjung: 25 orang
15. UPTD KPHL Hulu Batanghari: 20 orang
16. UPTD KPHL Solok: 32 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Doktor: 1 orang
- b. Magister (S2): 34 orang
- c. Sarjana (S1): 168 orang
- d. Diploma (D3): 21 orang
- e. Sekolah Menengah Atas (SMA): 163 orang
- f. Sekolah Menengah Pertama (SMP): 5 orang

Dari komposisi tersebut di atas, terdapat tenaga fungsional tertentu yaitu:

- a. Fungsional Polisi Kehutanan: 103 orang
- b. Fungsional Penyuluh Kehutanan: 48 orang
- c. Calon Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan: 2 orang
- d. Fungsional Perencana: 1 orang
- e. Calon Fungsional Pranata Komputer: 1 orang



1.6.2 Kondisi yang Diharapkan

Merujuk arah kebijakan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, pelaksanaan pembangunan kehutanan diarahkan untuk mencapai kondisi yang mendukung terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, baik secara ekologi, sosial/ekonomi, maupun secara kelembagaan. Secara rinci, kondisi dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1.6.2.1 Ekologi

Kondisi ekologi yang diinginkan antara lain adalah seimbangnya ekosistem hutan dalam menyangga kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya melalui pemantapan batas kawasan hutan dan meningkatnya pengakuan keberadaan kawasan hutan oleh para pihak, sehingga diharapkan dapat : (1) menurunnya praktek-praktek *illegal logging*, perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan serta perdagangan kayu ilegal, (2) terkendalinya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, (3) terciptanya kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan (4) meningkatnya fungsi hutan dan lahan yang telah terdegradasi melalui dukungan informasi dan perencanaan kehutanan yang lengkap dan terpadu.

1.6.2.2 Sosial/Ekonomi

Kondisi sosial/ekonomi yang diinginkan antara lain adalah: (1) meningkatnya pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, (2) meningkatnya minat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pemahaman para pihak terkait hutan dan kehutanan, (3) terciptanya prakondisi mitigasi perubahan iklim sehingga diharapkan masyarakat sekitar hutan dapat meningkatkan pendapatan perkapita mereka melalui skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), (4) meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di dalam dan di sekitar kawasan hutan, (5) terpenuhinya penyediaan kayu dari hutan tanaman, restrukturisasi industri dan optimalisasi industri perkayuan dan hasil hutan lainnya yang berorientasi pada pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan efisiensi penggunaan bahan baku hasil hutan, dan (6) berkembangnya usaha-usaha kehutanan seperti HHBK serta pembibitan dan perbenihan tanaman hutan.

1.6.2.3 Kelembagaan

Kondisi kelembagaan yang diinginkan antara lain : (1) meningkatnya kemampuan struktural dan fungsional organisasi, (2) tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dan (3) terciptanya koordinasi yang mantap dengan pusat dan kabupaten/kota dalam pembangunan kehutanan.





1.7 PENINGKATAN SISTEM AKIP DAN INOVASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Demi meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka dilakukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan tersebut. Salah satu upaya peningkatan sistem AKIP yang dikembangkan adalah melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala, yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan. Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan.

Inovasi peningkatan mutu pelayanan publik juga dikembangkan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui implementasi ISO 9001:2015. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya sertifikat ISO 9001:2015 dari Tuv Rheinland yang merupakan lembaga sertifikasi ISO pada bulan Januari 2018. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dengan patuh pada Sistem Operasional Prosedur (SOP) seperti yang tertuang dalam dokumen Standar Manual Mutu ISO 9001:2015 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan memenuhi seluruh sasaran mutu waktu pelayanan yang juga tertuang pada dokumen di atas. Setiap masyarakat yang hendak mendapatkan layanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat melihat Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan tata waktu penyelesaian layanan yang terpampang pada setiap unit kerja sesuai dengan jenis layanannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat pengguna layanan mengetahui dengan jelas alur proses layanan yang mereka mohonkan sehingga meyakinkan mereka bahwa layanan mereka akan selesai sesuai mutu waktu yang tertera pada SOP setiap jenis layanan. Hal ini menguatkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk selalu menerapkan *Good Governance and Clean Government*. Inovasi lain yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dalam skema Hutan Nagari (HN), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Kemasyarakatan (HKm).





2. Penerapan Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan, yang diimplementasikan dengan dibentuknya Satgas Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PHBN).
3. Sistem Layanan Elektronik Data Tematik Urusan Kehutanan (*Silek Datuak*) ini berawal dari konsep sederhana untuk menyediakan informasi dan dokumentasi tematik kehutanan secara interaktif. Filosofinya adalah “Anda butuh, Anda cari” yang diharapkan dapat meningkatkan literasi tematik kehutanan pada masyarakat luas. Sistem ini dirancang dengan memanfaatkan Microsoft Visual Studio 2010 yang memungkinkan masyarakat pengguna informasi berinteraksi langsung pada sistem karena tersedia komunikasi antar muka (*interface*).
4. Simulator Manejer untuk Perencanaan Hutan Tingkat Tapak (*Si Macan Hutan*) dirancang untuk pengelola hutan agar mereka dapat melakukan simulasi-simulasi berbasis komputer untuk menggambarkan sistem sesungguhnya (*real system*) dalam perencanaan. Si Macan Hutan dirancang dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Visual Basic pada Microsoft Visual Studio 2010. Pengelola dapat membangun asumsi perencanaan sesuai kebutuhan dan memberikan alternatif-alternatif skenario untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari.
5. Sistem Informasi Kawasan Hutan (*SiKawan*) merupakan jawaban dari belum adanya media baik *offline* maupun *online* yang mendukung ketersediaan informasi tentang kawasan hutan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara langsung dan update di Sumatera Barat. Melihat hal tersebut muncul inovasi untuk menyediakan media berbasis spasial yang mudah diakses oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya melalui sebuah Sistem Informasi Kawasan Hutan.
6. Safari Ramadhan Online merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah dalam menyikapi wabah Covid-19 dimana Safari Ramadhan Online diterapkan untuk memantau pelaksanaan tugas selama Bulan Ramadhan Tahun 2020, yang tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan kunjungan lapangan langsung. Pertemuan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan dilaksanakan terhadap seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kehutanan Sumatera Barat.
7. Sistem Informasi Kepuasan Layanan (*Sipasan*) merupakan informasi kepuasan layanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pengisian formulir pertanyaan kepuasan layanan disediakan secara *online* yang dirancang sedemikian rupa menggunakan *google form*. Hasil survei ditayangkan pada



website resmi Dishut Sumbar. Dengan demikian, pelanggan dapat mengisi formulir pertanyaan pada komputer/laptop dan HP android masing-masing serta masyarakat dimungkinkan untuk melihat hasilnya secara *real-time* pada website Dishut Sumbar.

8. Pasa KPH merupakan inovasi dalam rangka mendukung kemandirian KPH melalui media untuk memasarkan dan mempromosikan produk-produk KPH secara *online*. Sampai saat produk-produk KPH ini masih dipasarkan secara konvensional, sehingga informasi dan jangkauan pasarnya masih terbatas. Hal inilah yang mendorong dilakukannya inovasi penyajian Informasi dan promosi potensi serta produk-produk KPH secara online melalui “Pasa KPH”.

Melalui inovasi tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat masuk dalam 6 SKPD terinovatif Tahun 2020 yang sekaligus mengantarkan Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan kategori **Provinsi Sangat Inovatif** pada *Innovative Government Award (IGA) 2020*.

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja (LKj) ini pada dasarnya merupakan penjabaran pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan:

- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia.
- b. Aspek strategis organisasi
- c. Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.



Bab II – Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Bab IV – Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja Esselon II
- 2) Lain-lain yang dirasa perlu



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disusun secara berjenjang dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang berpedoman pada dokumen RPJMD serta memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran yang disahkan. Dari dokumen RPJMD tersebut, Dinas Kehutanan menyusun rencana strategis yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran, target, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan pembangunan, yang kemudian digunakan menjadi dasar penyusunan ikhtisar perjanjian kinerja.

2.1 RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan kerangka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Madani** adalah suatu masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, dan moral yang ditopang oleh keimanan.
2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi dan hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan tahun 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah *“adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”*;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;



4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Dari sepuluh prioritas di atas yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah **prioritas 10 yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana**.

2.2 RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana telah diubah dengan Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang,

tantangan, dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Secara ringkas, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN

2.2.2.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan satu tujuan berdasarkan rekomendasi Tim Penguatan SAKIP melalui Surat Keputusan Gubernur yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021 yaitu:

No.	Tujuan Organisasi Awal	Tujuan Organisasi Setelah Evaluasi Kementerian PAN-RB	Tujuan Organisasi sesuai rekomendasi tim penguatan SAKIP November 2018
1.	Memberikan kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari.	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan
2.	Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal	Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya.	Meningkatnya kinerja organisasi
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	
4.	Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan,	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	

2.2.2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta Perubahan RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Berdasarkan hasil

evaluasi Kementerian PAN RB pada bulan November 2019 dan evaluasi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat pada bulan Desember 2019 maka IKU Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang awalnya berjumlah sembilan IKU menjadi lima IKU. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2016-2021 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100	
			Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	%	80	81	82	-	-	-	
			Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	%	80	81	82	83	84	85	
		Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	0,18	0,43	1,09	-	-	-	
			Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	-	4,15	10	12	14	15	
			Persentase penurunan jumlah titik panas (<i>hotspot</i>) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	5	10	45	-	-	-	
		Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	5,32	8,50	11,68	14,86	18,03	21,21	
			Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan			95%	95%	95%	95%	-	-	-

2.2.3 CARA MENCAPAI SASARAN

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan pembangunan kehutanan yang dikerjakan secara bertahap per tahun. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari kebijakan Pembangunan Kehutanan Nasional melalui Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Langkah-langkah Strategis Pencapaian Sasaran

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Pemantapan Kawasan Hutan	Percepatan Proses Penyelesaian RTRW Subtansi Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1. Program Pemantapan Kawasan Hutan	1. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan 2. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya 3. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Dharmasraya 4. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Hulu Batang Hari 5. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota 6. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai 7. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pasaman Raya 8. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pesisir Selatan 9. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH



Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
	Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengusahaan dan Penatausahaan Hasil Hutan serta Industri Kehutanan	<ol style="list-style-type: none">Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHKProgram Pemanfaatan Potensi SDH	<p>Sijunjung</p> <ol style="list-style-type: none">Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH SolokPengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Bukit BarisanPengendalian Perencanaan dan Tata hutanSosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurialSupervisi dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan <ol style="list-style-type: none">Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi <ol style="list-style-type: none">Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam RayaPerencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman RayaPerencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH SijunjungPembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh KotaPembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH MentawaiPembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman RayaPembinaan dan Pengembangan



Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan
				8. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung
				9. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok
				10. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
				11. Pembinaan PNPB Sektor Kehutanan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya
				12. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya
				13. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari
				14. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota
				15. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai
				16. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya
				17. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan
				18. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung
				19. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok
				20. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
				21. Pengembangan Kemitraan Kehutanan





Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya 22. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari 23. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota 24. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai 25. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan 26. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok 27. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan 28. Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan
Menurunnya Laju Kerusakan Hutan	Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim	Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk Menunjang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya 2. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya 3. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari 4. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota 5. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai 6. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya 7. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan 8. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung 9. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok 10. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan 11. Patroli dan operasi





Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				fungsi polisi kehutanan wilayah kelola kph agam raya
				12. Patroli dan operasi fungsi polisi kehutanan wilayah kelola kph dharmasraya
				13. Patroli dan operasi fungsi polisi kehutanan wilayah kelola kph hulu batang hari
				14. Patroli dan operasi fungsi polisi kehutanan wilayah kelola kph mentawai
				15. Patroli dan operasi fungsi polisi kehutanan wilayah kelola kph pasaman raya
				16. Patroli dan operasi fungsi polisi kehutanan wilayah kelola kph pesisir selatan
				17. Patroli dan operasi fungsi polisi kehutanan wilayah kelola kph sijunjung
				18. Patroli dan operasi fungsi polisi kehutanan wilayah kelola kph solok
				19. Patroli dan operasi fungsi polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan
				20. Patroli dan operasi fungsi polisi kehutanan wilayah kelola limapuluh kota
				21. Pengamanan dan Perlindungan Hutan
				22. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
				23. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
				24. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
				25. Pengukuran Simpanan Karbon
				26. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
				27. Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan





Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
	Percepatan Rehabilitasi Hutan dan lahan	Penyediaan bibit dan Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ol style="list-style-type: none">Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya AlamProgram Pengendalian Kebakaran Hutan	<ol style="list-style-type: none">Evaluasi keberhasilan Penanaman N-5Konservasi Sumber Daya GenetikPembuatan Bibit Tanaman HutanPengembangan Perbenihan Tanaman HutanPengendalian pengelolaan Daerah Aliran SungaiPenyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRLRehabilitasi Hutan an Lahan Di Luar Kawasan HutanPencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam RayaPencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH DharmasrayaPencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Hulu Batang HariPencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Limapuluh KotaPencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH MentawaiPencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman RayaPencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Pesisir SelatanPencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH SijunjungPencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH SolokPencegahan dan Pengendalian



Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan 11. Supervisi dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Peningkatan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Skema HTR, HN dan HKm	1. Program Perhutanan Sosial	1. Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya 2. Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai 3. Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya 4. Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan 5. Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan 6. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya 7. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya 8. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari 9. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota 10. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya 11. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung 12. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan





Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				<p>Pada Wilayah Kelola KPH Solok</p> <p>13. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan</p> <p>14. Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat</p> <p>15. Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Kehutanan</p> <p>16. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan</p> <p>17. Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan</p> <p>18. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Agam Raya</p> <p>19. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada KPH Pasaman Raya</p> <p>20. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan Pada KPH Sijunjung</p> <p>21. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Dharmasraya</p> <p>22. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan,</p>





Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batang Hari 23. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Limapuluh Kota 24. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Pesisir Selatan 25. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Solok 26. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Bukit Barisan 27. Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan 28. Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan mangrove 29. Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan





Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat 1. Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan 2. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
Meningkatnya tata kelola organisasi	Percepatan Proses SPJ, Pelaporan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Internal Dinas Kehutanan	Peningkatan Kinerja Dinas Kehutanan pada Setiap Bidang dan Perencanaan Setiap Kegiatan yang Lebih Baik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi 5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 6. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor 7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor



Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess 6. Pengadaan Mebeleur 7. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 2. Penatausahaan Keuangan SKPD 3. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD 4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
			6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan 2. Pengembangan Data Dan Informasi Kehutanan 3. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan

Sumber: Revisi Rencana Strategis Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, untuk merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah, yaitu Kepala Dinas



Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan pemberi amanah, yaitu Gubernur Sumatera Barat, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan arahan tim evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan tim evaluasi Biro Organisasi setda Provinsi Sumatera Barat. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, indikator dan target tahunan dalam perjanjian kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%
		b. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	84%
2.	Menurunnya laju kerusakan hutan	a. Persentase penurunan laju kerusakan hutan	14%
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	a. Persentase Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	18,03%
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB

2.4 RENCANA KINERJA SASARAN

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun. Tahun 2020 adalah tahun kelima untuk Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2016-2021 yang lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.



Tabel 6. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
I	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan 	<p>100%</p> <p>84%</p>	<p>Percepatan Proses Penyelesaian RTRW subtransi kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan</p> <p>Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Program dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBD) Program Pemanfaatan Potensi SDH (APBD)
II	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	<ol style="list-style-type: none"> Persentase penurunan laju kerusakan hutan 	14%	<p>Penegakan hukum dalam pengamanan dan perlindungan hutan. Penguatan partisipasi masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>Penyediaan bibit dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan</p> <p>Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (APBD) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (APBD) Program Pengendalian Kebakaran Hutan (APBD)
III	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	<ol style="list-style-type: none"> Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat 	18,03%	Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN dan HKm	<ol style="list-style-type: none"> Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan (APBD)
IV	Meningkatnya tata kelola organisasi	<ol style="list-style-type: none"> Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 	BB	Peningkatan kinerja dinas kehutanan pada setiap bidang dan perencanaan setiap kegiatan yang lebih baik	<ol style="list-style-type: none"> Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (APBD) Program Peningkatan Disiplin Aparatur (APBD) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (APBD) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (APBD) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (APBD)

Sumber: Renja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Prov. Sumbar Tahun 2020



2.5 RENCANA KINERJA KEGIATAN

Dalam implementasinya, Rencana Kinerja Sasaran di atas akan dicapai dengan melaksanakan program pembangunan kehutanan maupun program pendukung lainnya yang terdiri atas kegiatan pembangunan kehutanan maupun kegiatan pendukung sehingga pencapaian kinerja sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan. Secara ringkas, Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang akan dicapai adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2020

No	SKPD/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET
	DINAS KEHUTANAN		
1	NON URUSAN		
1	PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 bulan
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan air, listrik dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	12 bulan
	5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembayaran tagihan rekening pajak bumi, bangunan, asuransi bangunan dan kendaraan yang terpenuhi	12 bulan
	8 Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi	12 bulan
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	12 bulan
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 bulan
	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan
	14 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 bulan
	16 Penyediaan Makanan dan Minuman	Pertemuan/ rapat yang diselenggarakan	12 bulan
	17 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah yang diikuti	12 bulan
	18 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Publikasi kegiatan OPD yang tersedia	12 bulan
	19 Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Wirid kantor dan kegiatan senam kantor	12 bulan
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAN APARATUR	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%
	8 Pengadaan Mebeleur	Kebutuhan Mebeleur yang terpenuhi	14 unit
	11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	47 unit
	14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Rumah dinas/ mess yang terpelihara	4 unit
	15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor dinas yang terpelihara	3 unit
	17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	12 bulan
	21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	203 unit



No	SKPD/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	
	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	12 bulan
	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Rumah jabatan yang terehabilitasi	1 unit
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase disiplin aparatur	100%	
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	458 orang
5	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	100%	
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur Sipil Negara yang mengikuti BIMTEK	63 Kali
6	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	100%	
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan yang tersusun	5 Dokumen
	4	Penatausahaan Keuangan SKPD	Penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran yang terlaksana	12 bulan
	6	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	5 Dokumen
	7	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan Kehutanan yang terlaksana	10 UPTD/ KPH
	8	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Honorium Pengelola Aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	12 bulan
2	KEHUTANAN			
1	PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	14%	
	1	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	5 Kasus
	2	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph agam raya	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Agam Raya	25 kali
	3	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph pasaman raya	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	25 kali
	4	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph sijnjung	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Sijnjung	15 kali
	5	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph dharmasraya	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	15 kali
	6	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph pesisir selatan	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	15 kali
	7	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola limapuluh kota	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Lima Puluh Kota	15 kali
	8	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph hulu batang hari	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	20 Kali
	9	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph solok	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Solok	15 kali



No	SKPD/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	
	10	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	20 kali
	11	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph mentawai	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Mentawai	20 kali
	12	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Wilayah kelola KPH agam raya yang dikonservasi	1 lokasi
	13	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang konservasi	1 lokasi
	14	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Wilayah kelola KPH Sijunjung yang di konservasi	1 lokasi
	15	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Wilayah kelola KPH Dharmasraya yang di konsersvasi	1 lokasi
	16	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang dikonservasi	1 lokasi
	17	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Wilayah kelola KPH Lima Puluh Kota yang di konservasi	1 lokasi
	18	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok	Wilayah kelola KPH Solok yang dikonservasi	1 lokasi
	19	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang konservasi	1 lokasi
	20	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang di konservasi	3 lokasi
	21	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai	Wilayah kelola KPH Mentawai yang di konservasi	1 lokasi
	22	Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam	450 orang
	23	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Pengembangan potensi jasa lingkungan yang difasilitasi	1 lokasi
	24	Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan	Peta laju kerusakan hutan yang tersusun	6 peta
	25	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan yang terlaksana	1 laporan
	26	Pengukuran Simpanan Karbon	Tersedianya data simpanan karbon	20 petak
	27	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	1 unit
2	PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)	55%	
	2	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam Raya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Agam Raya	20 kali
	3	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	20 kali
	4	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Sijunjung	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Sijunjung	20 kali
	5	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Dharmasraya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	20 kali



No	SKPD/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET		
	6	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Pesisir Selatan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	20 kali	
	7	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Hulu Batang Hari	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	20 kali	
	8	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Limapuluh Kota	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	20 kali	
	9	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Solok	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Solok	20 kali	
	10	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	25 kali	
	11	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Mentawai	20 kali	
	12	Supervisi Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	Jumlah supervisi dan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	17 kali	
3	REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Indeks tutupan hutan	61,84 %		
		Persentase penurunan luas lahan kritis	2,21 %		
	6	Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	Jumlah bibit yang berkualitas	250000 btg	
	7	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman huta, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	7 sertifikat, 2 buku	
	8	Konservasi Sumber Daya Genetik	Terbangun/ terpeliharanya sumber daya genetik	2 unit	
	10	Evaluasi keberhasilan Penanaman N-5	Monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5 yang dilaksanakan	10 lokasi	
	11	Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Kinerja pengelolaan DAS yang terevaluasi dan dokumen DAS yang tersusun	2 DAS	
4	PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	Optimalisasi PNBP sektor kehutanan dari HHK dan HHBK	84%		
		10	Monitoring PNBP Sektor Kehutanan	Termonitornya produksi hasil hutan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan	10 UPTD/KPH
		11	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang dibina di wilayah kelola KPH Agam Raya	2 unit
		12	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang dibina di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	5 unit
		13	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang dibina di wilayah kelola KPH Sijunjung	2 unit



No	SKPD/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET
14	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang dibina di wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 unit
15	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dibina di Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	3 unit
16	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dibina di Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	26 unit
17	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dibina di Wilayah kelola KPH Bukit Barisan	4 unit
18	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dibina di Wilayah kelola KPH Solok	2 unit
19	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dibina di Wilayah kelola KPH Mentawai	10 unit
20	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dibina di Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	2 unit
21	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	Jumlah Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	20 kali
22	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya	Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan termanfaatkan	2 etak
23	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya	Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan termanfaatkan	2 petak
24	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung	Jumlah petak pada wilayah KPH Sijunjung terencana dan termanfaatkan	2 petak
25	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya	Jumlah petak pada wilayah KPH Dharmasraya terencana dan termanfaatkan	2 petak
26	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan	Jumlah petak pada wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan termanfaatkan	2 petak
27	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari	Jumlah petak pada wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan termanfaatkan	2 petak
28	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota	Jumlah petak pada wilayah KPH Lima Puluh Kota terencana dan termanfaatkan	2 petak
29	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan	Jumlah petak pada wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan termanfaatkan	3 petak
30	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok	Jumlah petak pada wilayah KPH Solok terencana dan termanfaatkan	2 petak



No	SKPD/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	
	31	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai	Jumlah petak pada wilayah KPH Mentawai terencana dan termanfaatkan	2 petak
	32	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola	1 komoditi
	33	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola	1 komoditi
	34	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola	1 komoditi
	35	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Dharmasraya yang terkelola	1 komoditi
	36	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola	1 komoditi
	37	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola	1 komoditi
	38	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Lima Puluh Kota yang terkelola	1 komoditi
	39	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola	1 komoditi
	40	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok	Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	1 komoditi
	41	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Mentawai yang terkelola	1 komoditi
	42	Pengembangan Kemitraan Kehutanan	Jumlah kemitraan yang difasilitasi	4 unit
8	PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	
	4	Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan	Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	2 Laporan
	6	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	Jumlah data dan informasi kehutanan yang dikembangkan	2 Laporan
	7	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan	Jumlah Neraca Sumber Daya Hutan yang tersusun	1 buku
8	PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	18,03 %	
	1	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Jumlah SDM pengelola HN, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan yang mengikuti peningkatan kapasitas	180 orang
	2	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Agam Raya	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Agam Raya	3 kelompok
	3	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada KPH Pasaman Raya	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	3 kelompok
	4	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan Pada KPH Sijunjung	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Sijunjung	3 kelompok



No	SKPD/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET
5	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Dharmasraya	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 Kelompok
6	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Pesisir Selatan	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	2 kelompok
7	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batang Hari	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	3 kelompok
8	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Limapuluh Kota	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	3 kelompok
9	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPHL Bukit Barisan	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	4 kelompok
10	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Solok	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Solok	2 petak
11	Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat	Jumlah Supervisi, Bimtek dan Pembinaan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan	11 kali
12	Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	Jumlah pengelola Perhutanan Sosial yang mengikuti forum	110 orang
13	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah Koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	1 Kali
14	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	1 kali
15	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	1 kali
16	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	1 kali
17	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	2 kali
18	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove	Jumlah Supervisi dan pembinaan Pengembangan hutan mangrove	5 kali



No	SKPD/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET
19	Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkat kapasitas SDM	75 orang
20	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	1 unit
21	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	1 unit
22	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	1 unit
23	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Solok	1 unit
24	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	1 unit
26	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	1 unit
27	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	1 unit
29	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	1 unit
30	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	Jumlah supervisi dan pembinaan pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang dilaksanakan	8 kali
31	Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya dari Pemula menjadi Madya	5 Kelompok
9	PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%
1	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 km
2	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Agam Raya	3 unit
3	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pasaman Raya	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	4 unit
4	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Sijunjung	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Sijunjung	2 unit
5	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Dharmasraya	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Dharmasraya	2 unit
6	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pesisir Selatan	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	1 unit
7	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Hulu Batang Hari	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	2 unit
8	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	1 unit



No	SKPD/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET
9	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Solok	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Solok	4 unit
10	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Bukit Barisan	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	8 unit
11	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Mentawai	2 unit
12	Supervisi Pengendalian Penggunaan Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Jumlah Supervisi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan	20 kali
13	Pengendalian Perencanaan dan Tata hutan	Jumlah buku pengendalian perencanaan dan tata hutan yang disusun	1 buku
14	Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	Jumlah sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial yang dilaksanakan	20 kali

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

2.6 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Postur anggaran Tahun 2020 pada Dinas Kehutanan terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR), dan Dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan untuk pembangunan bidang kehutanan.

Postur anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan bidang kehutanan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 79.812.912.604,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 57.164.559.128,- atau turun 28,38%,. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci, Rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)
1	Pagu Awal	49,128,090,104	30,684,822,500
2	Pergeseran Anggaran	-	(202,307,800)
3	Rasionalisasi Tahap I	(4,354,194,598)	14,388,831,625)
4	Rasionalisasi Tahap II	(655,294,853)	250,000,000
5	Rasionalisasi Tahap III/Recofusing	(2,861,832,157)	(435,892,443)
Jumlah		41,256,768,496	15,907,790,632
Persentase (%)		72.17	27.83

Sumber: Pagu Anggaran Dinas Kehutanan Sumbar 2020

Jika dibandingkan dengan Anggaran pada Tahun 2019 dimana Belanja Langsung Rp. 53.168.473.450,- dan Belanja Tidak langsung Rp. 46.361.827.947,- maka Belanja Langsung pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 70,08% dan Belanja Tidak

langsung juga mengalami penurunan sebesar 11,01%. Hal tersebut menunjukkan bahwa alokasi untuk pembangunan kehutanan pada Tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan Tahun 2019, yang ditandai dengan semakin berkurangnya proporsi anggaran untuk belanja modal dan pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan (Belanja Langsung) dan juga dengan alokasi anggaran untuk belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung).

Pengurangan belanja pada Tahun 2020 tersebut terjadi pada pergeseran anggaran sebesar Rp. 202.307.800,- dan rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 23.495.618.233,- sedangkan penambahan anggaran berupa penambahan dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp. 250.000,- serta penambahan dana melalui Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 794.400.000,-.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang kehutanan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Alokasi Dana per Sasaran Tahun Anggaran 2020 dan 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran 2020		Anggaran 2019	
			Rp	%	Rp	%
1	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	60,151,250	0.38	707,766,000	1.33
		Nilai PNBPN sektor kehutanan	1,433,102,300	9.01	8,179,028,950	15.38
2	Menurunnya laju kerusakan hutan	Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan	8,223,353,094	51.69	31,600,512,250	59.43
3	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	1,031,780,600	6.49	4,623,977,000	8.70
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	5,159,403,388	32.43	8,057,189,250	15.15
Jumlah			15,907,790,632	100.00	53,168,473,450	100.00

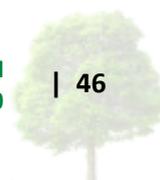
Sumber: Pagu Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Tahun 2020 dan 2019

Mencermati Tabel 9 tersebut di atas, sasaran strategis Menurunnya Laju Kerusakan Hutan dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan memiliki porsi anggaran terbesar pada Tahun Anggaran 2020 yaitu mencapai 51,69%, meskipun mengalami penurunan persentase dibandingkan Tahun Anggaran 2019 yang mencapai 59,43%.



Porsi Anggaran Tahun 2020 pada Sasaran Strategis Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 83,20% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019.

Upaya mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan pada Tahun 2020 didukung dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 1.031.780.600,- atau setara dengan 6,49% total anggaran pada tahun yang sama. Alokasi anggaran tersebut untuk mewujudkan indikator kinerja Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang meningkat, Dinas Kehutanan didukung dengan porsi anggaran mencapai 32,43% dari total pagu anggaran Tahun 2020 atau setara dengan Rp. 5.159.403.388,-. Meskipun pada Tahun 2020 porsi anggaran mengalami penurunan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tetap mendorong sejumlah upaya pembangunan kehutanan di Sumatera Barat untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera.





BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Proses pengukuran (*assessment*) dan penilaian yang sistematis merupakan suatu cara untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja sasaran pada instansi pemerintah dimana esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*), maupun dampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dibangun dengan komitmen mengimplementasikan ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya penyempurnaan dari ISO 9001:2015 dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kehutanan yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik yang dilakukan melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi.

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dilihat pada Tabel 10.

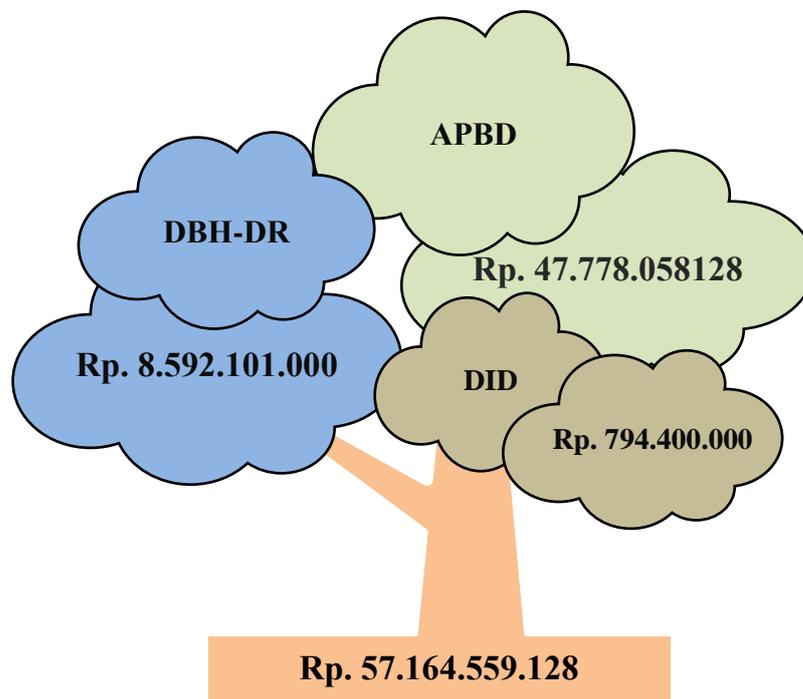
Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

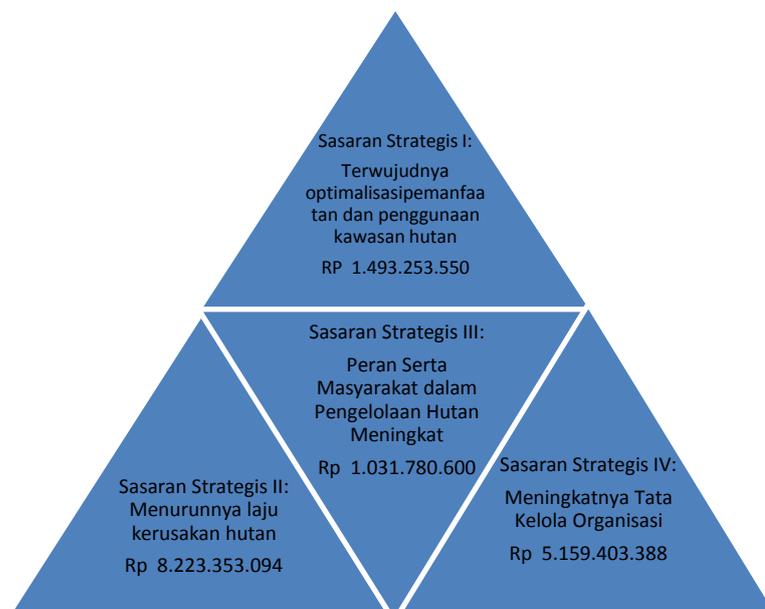
No.	Klasifikasi	Predikat	Kode
1.	85% - 100%	Sangat Baik	
2.	69% - 84%	Baik	
3.	53% - 68%	Cukup	
4.	< 53%	Gagal	

Sumber: Arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

POSTUR ANGGARAN 2020





Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas, pengukuran kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja provinsi lain yang berdekatan. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 10 akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 11.

Tabel 11. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Kode
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100	
		Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	84%	82.96%	98.76	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I					99.38	
2.	Menurunnya laju kerusakan hutan	Persentase penurunan luas kerusakan hutan	14%	14.73%	105.28	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi II					105.28	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Kode
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	18.03%	21.59%	119.74	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi III					119.74	
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	A	104.53	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi IV					104.53	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I s/d IV					107,23	

Sumber: Diolah dari data primer, penetapan kinerja, dan monev pembangunan kehutanan 2020

Hasil pengukuran kinerja di atas menunjukkan 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2020 dimana Dinas Kehutanan berhasil mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian sasaran strategis sebesar 107,23% yang termasuk kategori keberhasilan **SANGAT BAIK**.

Pencapaian sasaran strategis dari lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada tabel di atas dapat dilihat secara umum bahwa pencapaian kinerja pada kategori berhasil yaitu sesuai target dan bahkan beberapa indikator capaiannya melebihi target. Capaian realisasi indikator tertinggi adalah persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (119,74%). Selain sebagai dampak dari kebijakan/program/kegiatan perhutanan sosial yang dilakukan secara intensif oleh Dinas Kehutanan, hal ini juga didukung dengan adanya kolaborasi lintas sektor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Dukungan tersebut sebagai upaya dalam pengembangan perhutanan sosial, dimana dukungan areal kelola tersebut digunakan sebagai pengembangan sektor pangan, sektor energi terbarukan, pariwisata, desa tertinggal, pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha kecil dan ekonomi kreatif.

Hasil pencapaian kinerja pada Tabel 11 di atas merupakan kumulatif dari pencapaian program yang bersumber pada realisasi target kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat diilustrasikan pada realisasi capaian kinerja kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pembangunan kehutanan di atas merupakan hasil realisasi program/ kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bersama antar Dinas Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.

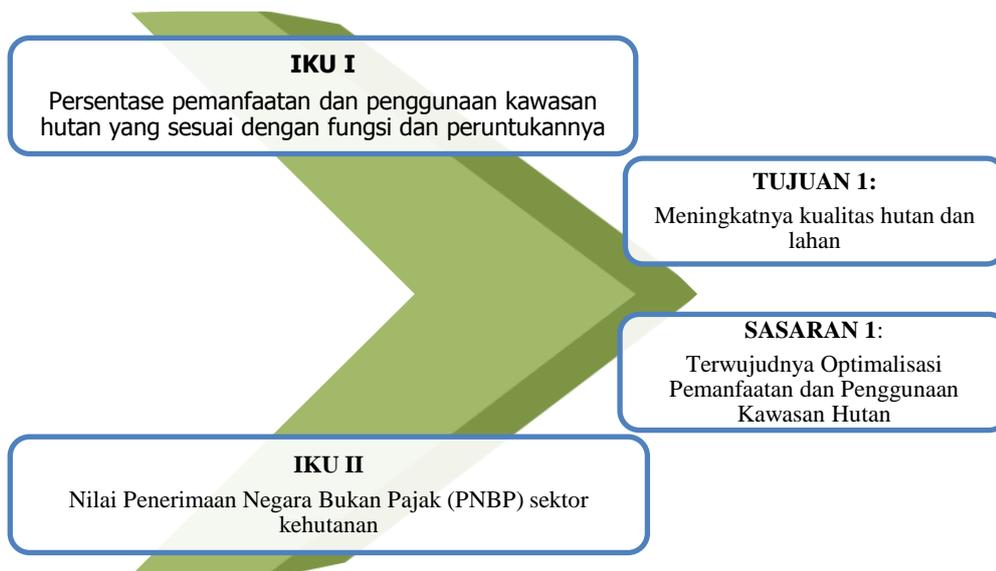
3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Mempedomani hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 11, pada sub bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (*outcome*) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:

I. Meningkatkan Kualitas Hutan dan Lahan

Tujuan **Meningkatkan Kualitas Hutan dan Lahan** dicapai dengan menetapkan tiga Sasaran Strategis. Sasaran Strategis I yaitu **Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan** dan diukur dengan dua indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian diatas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 1

“Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan” merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk lestarnya pengelolaan hutan khususnya

di Provinsi Sumatera Barat. Luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2017 adalah $\pm 2.286.883$ Ha atau 54,07% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ($\pm 4.229.730$ Ha) dengan komposisi fungsi kawasan hutan yang dikelola yaitu Hutan Lindung (± 775.305 Ha) dan Hutan Produksi (± 745.955 Ha). Sumatera Barat memiliki potensi hutan yang harus dimanfaatkan, baik hasil hutan maupun penggunaan kawasan hutan secara optimal. Nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan merupakan satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan. Jika produktivitas hutan meningkat maka diharapkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera dapat terwujud. Indikator kinerja, target, dan realisasi dari Sasaran 1 disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12. Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100
		Nilai PNBPN sektor kehutanan	83%	82,96%	98,76
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					99.38

Tabel 12 tersebut memperlihatkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis I Tahun 2020 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran 99,38% atau turun 2,73% dari tahun sebelumnya, namun masih termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Artinya capaian 99,38% tersebut menggambarkan bahwa potensi kawasan hutan Sumatera Barat telah dimanfaatkan dengan optimal dan sesuai target yang ditetapkan oleh Gubernur kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta telah sesuai dengan arah kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

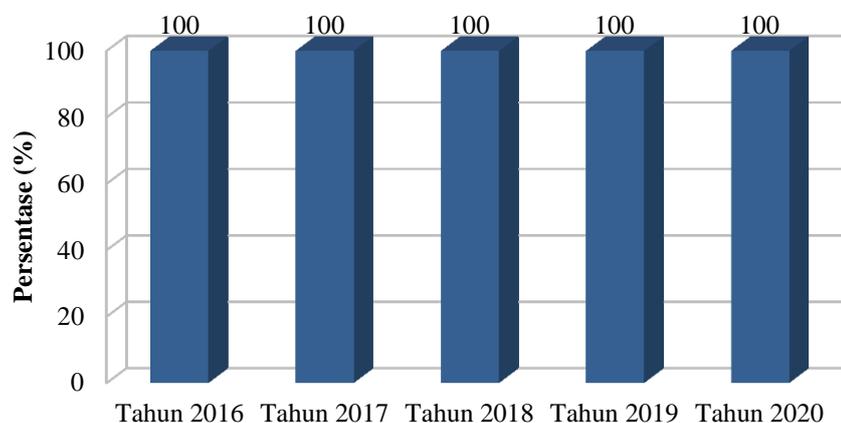
Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 dan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target		2020 (n)		2019 (n-1)	
		2020	2019	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai PNBPN sektor kehutanan	84%	83%	82,96%	98,76%	84,55%	101,87%

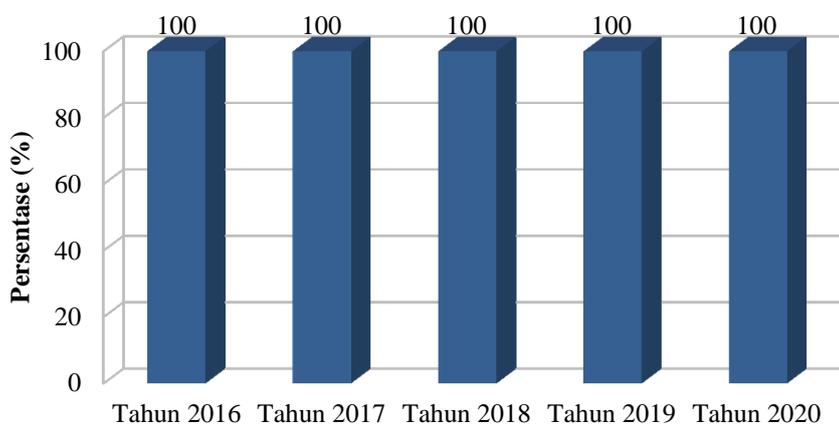
Capaian kinerja masing-masing indikator pada tabel di atas untuk indikator kinerja 1 yaitu Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya terealisasi sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Indikator kinerja 2 yaitu Nilai PNPB Sektor Kehutanan terealisasi 98,76% atau turun 3,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari realisasi dua indikator kinerja di atas artinya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan Tahun 2020 yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah optimal dan melebihi target yang ditetapkan.

Capaian kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3, 4, dan 5.

IKU 1



Gambar 3. Realisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) Tahun 2016 - 2020

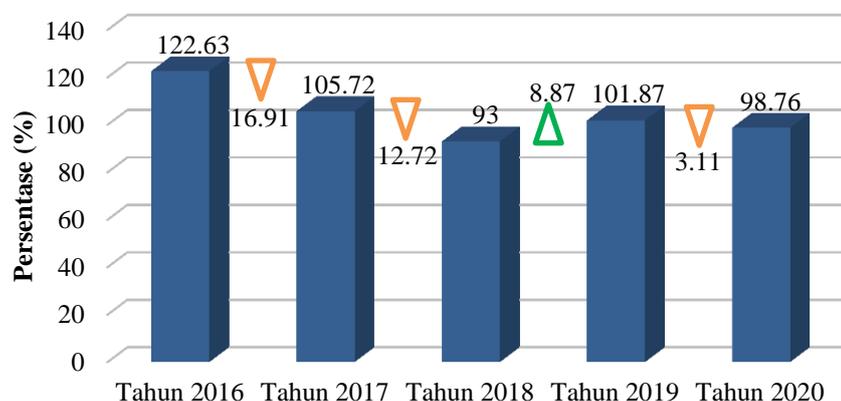


Gambar 4. Capaian Kinerja Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) Tahun 2016-2020

IKU 2



Gambar 5. Realisasi Nilai PNBP Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016 – 2020



Gambar 6. Capaian kinerja Nilai PNBP Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016 – 2020

Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra/ RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tingkat Kemajuan (%)
Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100
	Nilai PNBP sektor kehutanan	85%	82,96%	97,60

Dari tabel dan gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator kinerja 1 dan 2 jika dibandingkan dengan target kinerja pada akhir RPJMD

Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari uraian capaian masing-masing indikator kinerja terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja 1 yaitu Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya pada tahun keempat Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 100% sesuai dengan target akhir Renstra yaitu 100%, hal ini disebabkan hingga akhir Renstra target capaian indikator kinerja di atas tetap 100%.
- b. Indikator kinerja 2 yaitu Nilai PNBPN sektor kehutanan pada tahun kelima Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 97,60% atau masih dibawah target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Namun pada tahun kelima RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 indikator kinerja 2 memiliki target yaitu 98,82% artinya capaian indikator kinerja 2 pada Tahun 2020 lebih rendah 0,06% dari tingkat kemajuan yang seharusnya dicapai tahun ini.

Realisasi dari kedua indikator kinerja pada Tahun 2020 di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja 1 dan 2 pada sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sudah melebihi tingkat kemajuan terhadap target kinerja yang seharusnya dicapai.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi			Ket
		Sumbar 2020	Sumbar 2019	KemenLH K 2020	
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	1.Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	-	Belum ada data
	2.Nilai PNBPN sektor kehutanan	82,96%	84,55%	-	Belum ada data

Capaian kinerja masing-masing indikator pada Tabel 15 di atas dapat dilihat bahwa perbandingan target kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikarenakan belum adanya data untuk target indikator kinerja 1 dan 2.



Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2020		Ket
		Sumbar	Sumut	
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	1.Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	-	Belum ada data
	2.Nilai PNBK sektor kehutanan	98,76%	-	Belum ada data

Dari Tabel 16 dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja 1 untuk Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat belum dapat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, karena data terkait indikator tersebut belum diperoleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Namun jika bercermin dari tahun sebelumnya, pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara sama-sama telah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Capaian indikator kinerja 2, Provinsi Sumatera Utara pada tahun sebelumnya lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dikarenakan luas hutan produksi/IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam)/IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman) di Provinsi Sumatera Utara lebih luas/banyak dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui tiga program yang terdiri atas dua program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN. Program dimaksud adalah:

A. Program Pemantapan Kawasan Hutan yang terdiri atas dua belas kegiatan yaitu:

1. Pemeliharaan batas kawasan hutan
2. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Dharmasraya
3. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Hulu Batang Hari
4. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota
5. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai
6. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pasaman Raya



7. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pesisir Selatan
 8. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Sijunjung
 9. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Solok
 10. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Bukit Barisan
 11. Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
 12. Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial
- B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK yang terdiri atas satu sub kegiatan, yaitu Koordinasi Pengelolaan KPH dalam Rangka Fasilitasi Kelompok Tani Hutan (KTH)/Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan.
- C. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan yang terdiri atas tiga puluh enam kegiatan yaitu:
1. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota.
 2. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari.
 3. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya.
 4. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya.
 5. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai.
 6. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya.
 7. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan.
 8. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung.
 9. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok.
 10. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.





11. Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan.
12. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya.
13. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya.
14. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung.
15. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya.
16. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari.
17. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota.
18. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai.
19. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan.
20. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok.
21. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan.
22. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya.
23. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya.
24. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari.
25. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota.
26. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai.
27. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya.
28. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan.
29. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung.
30. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok.
31. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.
32. Pengembangan Kemitraan Kehutanan.
33. Pembangunan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan - alat ekonomi produksi (DAK).
34. Pembangunan Kantor KPH.
35. Penyediaan Prasarana Dasar Kantor KPH (DAK).
36. Monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan.

Secara keseluruhan, kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian target indikator sasaran melalui hasil dan capaian indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat dari Tabel 17.

Tabel 17. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis I Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a . Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Pemantapan kawasan hutan	1	Pemeliharaan batas kawasan hutan	Terpeliharanya Batas Kawasan Hutan	10 Km	10 Km	100%
				2	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Dharmastraya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Dharmastraya	1 Laporan	1 Laporan	100%
				3	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Hulu Batang Hari	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	1 Laporan	1 Laporan	100%
				4	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Lima puluh kota	1 Laporan	1 Laporan	100%
				5	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Mentawai	1 Laporan	1 Laporan	100%
				6	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pasaman Raya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	1 Unit	1 Unit	100%
				7	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pesisir Selatan	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	1 unit	1 unit	100%





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
				8	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Sijunjung	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelolaan KPH sijunjung	1 Laporan	1 Laporan	100%	
				9	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Solok	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Solok	1 Laporan	1 Laporan	100%	
				10	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Bukit Barisan	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	2 unit	2 unit	100%	
				11	Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Jumlah supervisi pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan	1 Laporan	1 Laporan	100%	
				12	Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	Terlaksananya Sosialisasi Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial	2 laporan	2 laporan	100%	
		b	Nilai PNBK sektor kehutanan	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	1	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	3 Unit	3 Unit	100%
				2	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	1 Laporan	1 Laporan	100%	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				3	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	2 Unit	2 Unit	100%
				4	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Agam Raya	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	1 Laporan	1 Laporan	100%
				5	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Mentawai	1 Laporan	1 Laporan	100%
				6	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	1 Unit	1 Unit	100%
				7	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	1 Unit	1 Unit	100%





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				8	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan	100%
				9	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Solok	2 Unit	2 Unit	100%
				10	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	2 Unit	2 Unit	100%
				11	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan insutri kehutanan	2 Kali/ 1 ranperda	2 Kali/ 1 ranperda	100%
				12	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya	Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan termanfaatkan	1 petak	1 petak	100%
				13	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya	Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan termanfaatkan	1 petak	1 petak	100%
				14	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung	Jumlah petak pada wilayah KPH Sijunjung terencana dan termanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan	100%
				15	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya	Jumlah petak pada wilayah KPH Dharmasraya terencana dan termanfaatkan	2 petak	2 petak	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				16	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari	Jumlah petak pada wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan termanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan	100%
				17	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota	Jumlah petak pada wilayah KPH Limapuluh Kota terencana dan termanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan	100%
				18	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai	Jumlah petak pada wilayah KPH Mentawai terencana dan termanfaatkan	1 petak	1 petak	100%
				19	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan	Jumlah petak pada wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan termanfaatkan	2 petak	2 petak	100%
				20	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok	Jumlah petak pada wilayah KPH Solok terencana dan termanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan	100%
				21	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan	Jumlah petak pada wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan termanfaatkan	1 petak	1 petak	100%
				22	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola	1 Laporan	1 Laporan	100%
				23	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Dharmasraya yang terkelola	1 Komoditi	1 Komoditi	100%
				24	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola	1 Laporan	1 Laporan	100%
				25	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang terkelola	1 Laporan	1 Laporan	100%
				26	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Mentawai yang terkelola	1 Laporan	1 Laporan	100%





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				27	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola	1 komoditi	1 komoditi	100%
				28	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola	1 Komoditi	1 Komoditi	100%
				29	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola	1 Laporan	1 Laporan	100%
				30	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	1 Laporan	1 Laporan	100%
				31	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah Potensi hasil hutan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola	1 Laporan	1 Laporan	100%
				32	Pengembangan Kemitraan Kehutanan	Jumlah kemitraan yang difasilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
				33	Pembangunan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan - alat ekonomi produkti (DAK)	Peningkatan masyarakat desa sekitar hutan untuk penurunan indeks gini	6 Unit	6 Unit	100%
				34	Pembangunan Kantor KPH	Terbangunnya kantor KPH pada dinas kehutanan	4 Unit	4 Unit	100%
				35	Penyediaan Prasarana Dasar Kantor KPH (DAK)	Tersedianya sarana prasarana kantor KPH	4 KPH	4 KPH	100%
				36	Monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan	Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sektor Kehutanan	1 UPTD KPH	1 UPTD KPH	100%

Uraian capaian IKU Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ”Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya” memiliki target sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator ini dihitung dengan formula **luas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya pada Tahun 2020 dibagi dengan luas kawasan hutan yang dibebani izin pada Tahun 2020 dikalikan angka 100%**.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Pemantapan Kawasan Hutan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK seperti terlihat pada Tabel 17 di atas. Capaian Target IKU persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya Tahun 2020 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18. Capaian Target IKU Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya per Triwulan Tahun 2020.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	Capaian %	TRW II	Capaian %	TRW III	Capaian %	TRW IV	Capaian %
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	a Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	0%	70%	100%	100%	0%	100	70%	100	100%	100	100%	100

Tabel 18 di atas memperlihatkan bahwa capaian indikator tersebut diatas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai target triwulan yang ditetapkan. Tercapainya target setiap triwulan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.

Untuk mencapai target kinerja indikator ”Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya” Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi terhadap unit penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan, unit pemanfaatan hutan untuk Izin





Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri, unit pemanfaatan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sesuai dengan perizinan yang diberikan atas hak penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Pesatnya perkembangan pembangunan kegiatan non kehutanan pada kawasan hutan, pengelolaan hutan melalui IUPHHK-HA/HTI, dan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam skema Perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat mendorong perlunya dilakukan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan Hutan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peruntukan dan perizinannya serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perizinan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kepastian dalam penggunaan kawasan hutan. Pada Tahun 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap unit-unit penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan seperti disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Hasil Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Sesuai Izin
1.	Bupati Pasaman Barat	Pembangunan Pelabuhan Umum dan Jalan Teluk Tapang – Air Bangis	122,01	HP dan HL	Sesuai
2.	PT. Gamindra Mitra Kesuma	Operasi Produksi Biji Besi dan Jalan Tambang	102,22	HP	Sesuai
3.	LAPAN	Loka pengamatan Atmosfer	17,17	HPT	Sesuai
4.	Bupati Lima Puluh Kota	Pembangunan jalan menuju Transmigrasi Koto Tengah	8,37	HPK	Sesuai
5.	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Pembangunan jalan menuju lokasi Transmigrasi Padang Tarok	14,48	HPK	Sesuai
6.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok	Pembangunan jalan ruas Aie Luo – Kipek	4,40	HPT	Sesuai
7.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok	Pembangunan jalan ruas Sapan - Air Dingin	0,571	HPT	Sesuai
8.	Bupati Solok	Pembangunan jalan ruas Kapujan – Rimbo Data dan Garabak Data – Batu Bajanjang	11,45	HL Batang Palangki	Sesuai
9.	Walikota Padang	Pembangunan jalan Bungus – Kalampaian	17,05	HL	Sesuai
10.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pembangunan Intake dan jaringan Pipa Air Bersih	0,0575	HL Barisan I	Sesuai



No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Sesuai Izin
11.	PT. Galian Endapan Buana	Pertambangan galena	153,89	HP	Sesuai
12.	Bupati Kepulauan Mentawai	Pembangunan Instalasi Listrik Biomasa	5,29	HP	Sesuai
13.	PT. Semen Padang	Tambang Batu Kapur	242,30	HPT	Sesuai
14.	PT. Hitay Daya Energy	Eksplorasi Panas Bumi (Geothermal)	679,00	HL	Sesuai
15.	PT. Allied Indo Coal Jaya	Tambang Batubara	388,96	HP Serasah	Sesuai
16.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto	Pembangunan Embung, Intake Air Baku dan Jalan Sumpahan	3,65	HPK	Sesuai
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Provinsi Sumbar	Rehabilitasi bending dan jaringan irigasi Batang Sangki I	2,00	HL	Sesuai
18.	PT. PLN (PERSERO) PIKITRING SBS	Pembangunan PLTU	51,192	HL	Sesuai
19.	PT. PLN (Persero)	SUTT dan Tapak Tower Ombilin - KiliranJao	18,37	HL & HP	Sesuai
20.	PT. Multi Energi Dinamika	PLTM Tarusan	4,50	HL	Masa berlaku izin telah habis
21.	PT. PLN (Persero)	Transmisi SUTET 275 Kv GI Padang Sidempuan - GI Payakumbuh	25,78	HL dan HP	Sesuai
22.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumbar	Pembangunan terowongan jalan Balingka - Sianok	2,70	HL	Sesuai
23.	Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan	Pembangunan Jalan Tanjung Durian - Talanta	12,83	HL dan HPT	Dalam Proses Revisi
24.	PT. Dempo Sumber Energi	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Pelangai Hulu dan Sarana Penunjangnya	54,18	HPT dan HPK	Sesuai
25.	PT. Bumi Indonesia Bersinar	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	348,62	HPT	Sesuai
26.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembangunan/ Peningkatan Kualitas Jalan Trans Mentawai	254,24	HP dan HPK	Sesuai
27.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembangunan Jalan Kabupaten	89,90	HP dan HPK	Sesuai
28.	Pemerintah Kabupaten Pasaman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Rao - Padang Lawas	14,89	HL	Sesuai
29.	Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan	Pembangunan Jalan Koto Birah - Simancuang	4,99	HL dan HPT	Sesuai
30.	PT. PLN (Persero)	Jaringan Transmisi Eksisting 150 kV Singkarak - Padang Panjang	11,03	HL	Sesuai



No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Sesuai Izin
31.	PT. PLN (Persero)	Pembangunan SUTT 150 kV Gardu Induk Muaro Labuh - Sungai Rumbai	33,93	HL, HP dan HPK	Sesuai
32.	PT. PLN (Persero)	Pembangunan Jalur SUTET 275 kV Payakumbuh - Garuda Sakti	20,22	HL, HPT dan HP	Sesuai
33.	PT ANDALAS MERAPI TIMBER Camp Barikan – sangir Jujuhan Solsele	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam	± 28.840	HP	Masa Berlaku Izin Telah Habis
34.	PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA Camp Tiniti – Siberut Barat	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam	± 47.605	HP	Sesuai
35.	PT. MULTIKARYA LISUN PRIMA Camp Padang Tarok – Sijunjung	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam	± 28.885	HPT	Sesuai
36.	PT. MINAS PAGAI LUMBER Camp Polaga – Sikakap	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam	± 78.000	HP	Sesuai
37.	PT. BUKIT RAYA MUDISA Km. 7 Camp MuaraTakung – Sijg	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan – Hutan Tanaman	± 28.617	HP	Sesuai
38.	PT. DHARA SILVA LESTARI Kenagarian Bonjol – Koto Baru	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan – Hutan Tanaman	± 15.357	HP	Sesuai
39.	PT. SUKSES JAYA WOOD Kenagarian Lunang – Silaut	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan – Hutan Tanaman	1.583,90	HP	Sesuai
40.	PT. BIOMASS ANDALAN ENERGI Camp. Mauara Sikabalu – Kep. Mentawai	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan – Hutan Tanaman	± 19.875	HP	Sesuai
30.	1. LPHN Simanau 2. LPHN Sirukam 3. LPHN Sungai Abu 4. LPHN Saria Alahan Tigo 5. LPHN Simancuang 6. LPHN Pulakek Koto Baru 7. LPHN Pakan Rabaa 8. LPHN Pasir Talang Timur 9. LPHN Koto Baru 10. LPHN Ranah Pantai Cermin 11. LPHN Padang Limau Sundai 12. LPHN Sako Utara Pasie Talang 13. LPHN Lubuk Gadang Selatan	Hutan Nagari (HN) Hutan Nagari (HN)	1.088 1.789,83 6.657 4.138 650 4.265 4.260 2.395 1.145 1.952 2.244 204 4.550	HL HL HL HL HL HL & HPT HL & HPT HL & HPT HL & HPT HL HL HL	Sesuai



No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Sesuai Izin
14.	LPHN Pakan Rabaa Timur	Hutan Nagari (HN)	5.140	HL & HPT	
15.	LPHN Padang Air Dingin	Hutan Nagari (HN)	1.993	HL	
16.	LPHN Padang Gantiang	Hutan Nagari (HN)	1.579	HL	
17.	LPHN Pakan Rabaa Tengah	Hutan Nagari (HN)	327	HPT	
18.	LPHN Lubuk Malako	Hutan Nagari (HN)	761	HL	
19.	LPHN Paru	Hutan Nagari (HN)	4.500	HL	
20.	LPHN Muaro Takung	Hutan Nagari (HN)	1.169	HL	
21.	LPHN Lubuk Tarantang	Hutan Nagari (HN)	247	HL	
22.	LPHN Manganti	Hutan Nagari (HN)	1.247	HL	
23.	LPHN Sungai Betung	Hutan Nagari (HN)	597	HL	
24.	LPHN Aie Angek	Hutan Nagari (HN)	4.025	HL	
25.	LPHN Langki	Hutan Nagari (HN)	504	HL	
26.	LPHN Sisawah	Hutan Nagari (HN)	2.502	HL	
27.	LPHN Timbulun	Hutan Nagari (HN)	76	HL	
28.	LPHN Pulasan	Hutan Nagari (HN)	348	HL	
29.	LPHN Silongo	Hutan Nagari (HN)	154	HL	
30.	LPHN Kampung Dalam	Hutan Nagari (HN)	140	HL	
31.	LPHN Sumpur Kudus	Hutan Nagari (HN)	3.862	HL	
32.	LPHN Tanjuang Bonai Aur	Hutan Nagari (HN)	366	HL & HP	
33.	LPHN Unggan	Hutan Nagari (HN)	5.080	HL	
34.	LPHN Buluh Kasok	Hutan Nagari (HN)	763	HL	
35.	LPHN Lubuk Tarok	Hutan Nagari (HN)	1.828	HL	
36.	LPHN Air Bangis	Hutan Nagari (HN)	2.664	HL	
37.	LPHN Katiagan	Hutan Nagari (HN)	780	HL	
38.	LPHN Simpang	Hutan Nagari (HN)	616	HL	
39.	LPHN Muaro Sei Lolo	Hutan Nagari (HN)	1.620	HL	
40.	LPHN Tanjung Betung	Hutan Nagari (HN)	375	HL	
41.	LPHN Ganggo Mudiak	Hutan Nagari (HN)	2.764	HL & HPT	
42.	LPHN Padang Mentinggi	Hutan Nagari (HN)	3.485	HL	
43.	LPHN Muara Tais	Hutan Nagari (HN)	9.428	HL	
44.	LPHN Alahan Mati	Hutan Nagari (HN)	340	HL	
45.	LPHN Silayang	Hutan Nagari (HN)	5.229	HL	
46.	LPHN Koto Nopan	Hutan Nagari (HN)	10.656	HL	
47.	LPHN Jambak	Hutan Nagari (HN)	4.220	HL & HPT	
48.	LPHN Lubuk Gadang	Hutan Nagari (HN)	2.364	HL	
49.	LPHN Gunung Selasih	Hutan Nagari (HN)	4.332	HL	
50.	LPHN Lubuk Karak	Hutan Nagari (HN)	1.708	HL & HPT	
51.	LPHN Pagadih	Hutan Nagari (HN)	768	HL	
52.	LPHN Padang Tarok	Hutan Nagari (HN)	250	HL	
53.	LPHN Simarasok	Hutan Nagari (HN)	394	HL	
54.	LPHN Koto Kaciak	Hutan Nagari (HN)	143	HL	
55.	LPHN Lubuk Basung	Hutan Nagari (HN)	119	HL	
56.	LPHN Baringin	Hutan Nagari (HN)	484	HL	
57.	LPHN Kamang Hilia	Hutan Nagari (HN)	364	HL	
58.	LPHN Sitalang	Hutan Nagari (HN)	255	HL	
59.	LPHN Koto Rantang	Hutan Nagari (HN)	1.509	HL & HPT	
60.	LPHN Pasia Laweh	Hutan Nagari (HN)	4.025	HL & HPT	
61.	LPHN Kamang Mudiak	Hutan Nagari (HN)	2.800	HL	
62.	LPHN Sungai Buluh	Hutan Nagari (HN)	780	HL	
63.	LPHN Sungai Rimbang	Hutan Nagari (HN)	663	HL	
64.	LPHN Taeh Bukik	Hutan Nagari (HN)	438	HL	
65.	LPHN Kubang	Hutan Nagari (HN)	73	HL	
66.	LPHN Taram	Hutan Nagari (HN)	800	HL	



No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Sesuai Izin
	67. LPHN Kurai	Hutan Nagari (HN)	1.464	HL	
	68. LPHN Sungai Balantiak	Hutan Nagari (HN)	467	HL	
	69. LPHN Pandam Gadang	Hutan Nagari (HN)	850	HL	
	70. LPHN Banja Laweh	Hutan Nagari (HN)	807	HL	
	71. LPHN VII Koto Talago	Hutan Nagari (HN)	186	HL	
	72. LPHN Sialang	Hutan Nagari (HN)	7.256	HL & HPT	
	73. LPHN Baruah Gunung	Hutan Nagari (HN)	2.133	HL	
	74. LPHN Harau	Hutan Nagari (HN)	3.096	HL	
	75. LPHN Koto Tinggi	Hutan Nagari (HN)	1.460	HL	
	76. LPHN Simpang Kapuak	Hutan Nagari (HN)	4.612	HL	
	77. LPHN Batipuah Baruah	Hutan Nagari (HN)	519	HL	
	78. LPHN Kambang Timur	Hutan Nagari (HN)	815	HPT	
	79. LPHN Lunang	Hutan Nagari (HN)	3.233	HPT	
	80. LPHN Lunang Tengah	Hutan Nagari (HN)	1.163	HPT	
	81. LPHN Kapujan Koto Berapak	Hutan Nagari (HN)	111	HL	
	82. LPHN Barung2 Belantai Selatan	Hutan Nagari (HN)	432	HL	
	83. LPHN Pondok Parian Lunang	Hutan Nagari (HN)	1.386	HPT	
31.	1. HKm Maju Bersama	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	145	HL	Sesuai
	2. HKm Gunung Leco	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	1.360	HL	
	3. HKm Ingin Makmur	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	528	HL	
	4. HKm ICU	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	4.050	HL	
	5. HKm Pasada Roha Bulu Laga	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	1.172	HL	
	6. HKm Marguna Alam	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	2.000	HL	
	7. HKm Situak	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	167	HL	
	8. HKm Roba Julu	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	358	HL	
	9. HKm Gunung Sigantang	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	580	HL	
	10. HKm Suka Menang Aia Kacang	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	617	HL	
	11. HKm Saiyo	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	96	HL	
	12. HKm Rap Hita Saiyo	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	100	HL	
	13. HKm Tombang Pinang	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	100	HL	
	14. HKm Harapan Baru	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	100	HL	
	15. HKm Karya Setia	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	150	HL	
	16. HKm Pangduhu Maju	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	140	HL	
	17. HKm Sontra	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	350	HL	
	18. HKm Beringin Sakti	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	230	HL	
	19. HKm Bukit Lestari	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	100	HL	





No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Sesuai Izin
20.	HKm Patamuhan Saiyo	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	496	HL	
21.	HKm Musus Saiyo	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	350	HL	
22.	HKm Harapan Jaya Batu Ampar	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	106	HL	
23.	HKm Wana Lestari	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	240	HL	
24.	HKm KSU Solok Rajo	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	3.200	HL & HPT	
25.	HKm KSU-ED Tabek	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	1.233	HL	
26.	HKm Aur Serumpun	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	400	HL	
27.	HKm Leter W	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	404	HL	
28.	HKm Sialangan	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	444	HL	
29.	HKm Sungai Tuo	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	360	HL	
30.	HKm Batu Bapayuang	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	77	HP	
31.	HKm Lurah Basuang	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	198	HP	
32.	HKm Tak Boncah Batu Badaguak	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	1.117	HP & HPT	
33.	HKm Padang Janiah	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	250	HL	
34.	HKm Sikayan Balumuik	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	300	HL	
35.	HKm Simpang Tanjung	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	350	HL	
36.	HKm Sungai Abu Mandiri	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	260	HL	
37.	HKm Saiyo Sakato	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	4.790	HL	
38.	HKm Rambaian Manduang	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	370	HL	
39.	HKm Kubuak	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	288	HL	
40.	HKm Kampuang Malayu Saiyo	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	127	HP	
41.	HKm Tetesan Embun	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	603	HPT	
42.	HKm Agroforestri Aro Sepakat	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	112	HL	
32.	1. KTH Minang Saiyo, 2. KTH Giat Bersama, 3. KTH Mekar Jaya, 4. KSU Air Bangis	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	2.246,89	Hutan Produksi	Sesuai
33.	1. KTH Putra Andam 2. KTH Usaha Bersama	Kemitraan	404	Hutan Produksi	Sesuai

Menganalisa Tabel 19 di atas dapat disimpulkan bahwa, pada Tahun 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 171 unit/perusahaan yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan

kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat atau turun 3,93% (7 unit) dari Tahun 2019 dimana 7 (tujuh) unit tersebut merupakan perusahaan/pengguna yang legalitas izin usahanya tidak berlaku. 171 unit/perusahaan tersebut terdiri atas 32 unit menggunakan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan, 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri, 83 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), 42 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan 2 unit memanfaatkan Kawasan hutan untuk kemitraan. Sebanyak 178 unit/perusahaan yang memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan tersebut di atas, berdasarkan hasil evaluasi tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, telah menggunakan dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sesuai aturan yang berlaku.

2. Indikator Nilai PNBK Sektor Kehutanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Nilai PNBK Sektor Kehutanan" memiliki target sebesar 84%, terealisasi sebesar 82,96% dengan tingkat capaian 98,76% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator ini dihitung dengan formula **jumlah realisasi nilai PSDH dan DR dibagi dengan jumlah target nilai PSDH dan DR dibagi angka 100%**. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Potensi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan. Capaian Target IKU Nilai PNBK Sektor Kehutanan Tahun 2020 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 20 berikut ini.

Tabel 20. Capaian Target IKU Nilai PNBK Sektor Kehutanan per Triwulan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Terwujudnya Nilai Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	a Nilai PNBK sektor kehutanan	20%	40%	60%	84%	5.32%	27,00	22.28%	57%	309%	50,00	82,96%	98,76

Capaian indikator kinerja "Nilai PNBK Sektor Kehutanan" setiap triwulannya belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga terealisasi dibawah target. Hal ini disebabkan pada Tahun 2020 pemegang izin pemanfaatan hasil hutan belum melakukan kegiatan secara optimal dikarenakan menurunnya jumlah produksi kayu disebabkan pandemi Covid-19 sehingga diberlakukan pembatasan aktivitas petugas

di lapangan, adanya kelesuan pasar akibat pandemi Covid-19, adanya relaksasi kebijakan fiskal juga adanya konflik dengan masyarakat sehingga Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan. Hal tersebut juga berdampak terhadap target nasional PNBPN Sektor Kehutanan dimana pada Tahun 2020 terdapat pengurangan target sebesar $\pm 27\%$ yang akhirnya juga berimbas pada penurunan target PNBPN Sektor Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat yang semula Rp. 37.990.440.000,- menjadi Rp. 28.406.627.000,- dengan realisasi penerimaan PNBPN Tahun 2020 sebesar Rp. 23.566.825.621,-.

Pencapaian target kinerja pada indikator ini sudah baik dan sudah melakukan perbaikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan, diantaranya adalah monitoring dan evaluasi terhadap realisasi PNBPN sektor kehutanan sudah dilakukan pada tingkat tapak yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan sehingga pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan lebih intensif dan efektif kepada unit pemegang izin pemanfaatan hasil hutan. Hal ini perlu dipertahankan oleh seluruh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terutama unit kerja terkait.

Untuk mencapai target kinerja indikator "Nilai PNBPN Sektor Kehutanan", Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sesuai dengan target PNBPN yang ditetapkan.

PNBPN sektor kehutanan harus dimonitor agar sesuai dengan target PNBPN yang ditetapkan serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perizinan yang berlaku. Pada Tahun 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi PNBPN sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Barat dengan uraian seperti pada Tabel 21.

Tabel 21. Target dan Realisasi PNBPN Sektor Kehutanan di Sumatera Barat Tahun 2020

No	Sumber PNBPN	Rasionalisasi Target Nasional			Realisasi		
		Produksi (M ³)	Penerimaan PNBPN (Rp)		Produksi (M ³)	Penerimaan PNBPN (Rp)	
			DR	PSDH		DR	PSDH
A.	Hasil Kayu (Hutan Alam)						
1.	PT Salaki Summa Sejahtera	31,432	8,047,312,788	2,663,276,676	37,923.96	7,890,242,544	2,604,006,740
2.	Minas Pagai Lumber	34,678	6,886,234,827	2,571,047,455	33,934.70	7,056,919,152	1,925,875,510
3.	Multi Karya Lisun Prima	10,951	2,018,599,448	619,072,852	8,583.19	1,701,024,048	294,284,920
4.	Dhara Silva Lestari		-	-	180.36	30,031,488	7,166,540
5.	PT Biomass Andalan Energi	18,251	3,500,609,170	1,200,243,284	-	-	-
	Jumlah A	95,311	20,452,756,232	7,053,640,267	80,622	16,678,217,232	4,831,333,710
B.	Hasil Kayu (HTI)						



1.	PT Bukit Raya Mudisa	36,503	-	353,755,915	42,657.28	-	358,321,152
	Jumlah B	36,503	-	353,755,915	42,657.28	-	358,321,152
C.	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)	1,460	255,518,768	74,962,563	6,266.25	1,005,503,904	264,194,570
D.	Lain-lain	-	-	-	983.54	239,174,352	71,726,009
	Jumlah C + D	1,460	255,518,768	74,962,563	7,250	1,244,678,256	335,920,579
E.	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)						37,845,822
1.	Getah Pinus	759	-	36,790,615	608.00	-	12,300,000
2.	Sarang Burung Walet	1,095	-	75,804,839	205.00	-	57,744,840
3.	Rotan (Manau, Mawi, Tabu-tabu)	423,431	-	87,933,613	332,012.00	-	392,430
4.	Rotan Sega	-	-	-	9.00	-	10,071,600
5.	Getah Karet	88	-	15,160,968	67.14	-	-
	Lain-lain	88	-	303,219	-	-	-
	Jumlah E		-	215,993,255	332,901	-	118,354,692
TOTAL			20,708,275,000	7,698,352,000	463,430	17,922,895,488	5,643,930,133
Σ PSDH + DR				28,406,627,000			23,566,825,621
PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN (%)							82.96

Dari Tabel 21 di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2020, realisasi PNBP terhadap target terealisasi rata-rata sebesar 82,96% atau turun 1,59% dari tahun sebelumnya. Realisasi nilai PNBP sektor kehutanan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi nilai PSDH+DR}}{\text{Target nilai PSDH+DR}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Rp } 17.922.895.488 + \text{Rp } 5.643.930.133}{\text{Rp } 20.708.275.000 + \text{Rp } 7.698.352.000} \times 100\% = 82,96\%$$

Permasalahan:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan perusahaan terhadap aturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan;
2. Masih kurangnya partisipasi perusahaan untuk melakukan kewajibannya sebagai pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
3. Masih terbatasnya pemantauan terhadap aktivitas pemanfaatan dan penggunaan kawasan pada areal-areal konsesi.
4. Jumlah produksi kayu menurun akibat kelesuan pasar yang disebabkan pandemi Covid-19
5. Adanya konflik antara pemegang konsesi usaha dengan masyarakat sehingga target RKT tidak dapat terpenuhi.

Solusi:

1. Melakukan peningkatan pengetahuan dan informasi melalui sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan kepada masyarakat maupun perusahaan;
2. Melakukan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
3. Melakukan identifikasi, monitoring, dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di kabupaten/kota dengan meningkatkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai UPTD Dinas Kehutanan yang berlokus di Kabupaten/Kota.
4. Optimalisasi PNPB melalui rasionalisasi target PNPB sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Barat sesuai kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka relaksasi kebijakan fiskal nasional.
5. Resolusi konflik dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat sekitar konsesi melalui pelibatan aktif baik masyarakat maupun lembaga masyarakat.

II. Menurunnya Laju Kerusakan Hutan

Sasaran Strategis 2 yaitu **Menurunnya Laju Kerusakan Hutan**, diukur dengan satu indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Tujuan, Sasaran Strategis 2, dan Indikator Kinerja Utama 3

Guna Optimalisassi daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan (per tahun) melalui upaya menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan, diantaranya dengan menjaga hutan dari *illegal logging* dan kebakaran hutan yang merupakan penyebab kerusakan



hutan. Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan hutan seluas \pm 2.286.883,10 Ha dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: SK.4/V-DAS/2015 tentang Penetapan Peta dan Data Hutan dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2015, total lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat adalah 630.695 Ha artinya 27,58% dari kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat yang diidentifikasi mengalami penurunan daya dukung ekologi dan ekosistem (kritis).

Luas lahan kritis seluas 630.695 Ha yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini merupakan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan angka tersebut dengan menurunkan laju kerusakan hutan. Laju kerusakan hutan diturunkan melalui berbagai upaya diantaranya dengan menurunkan luas lahan kritis dan menurunkan titik panas (*hotspot*).

Tabel 22. Pencapaian Kinerja Sasaran Menurunnya Laju Kerusakan Hutan Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Menurunnya Laju Kerusakan Hutan	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	14%	14,73%	105,28
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					105,28

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 pada Tahun 2020 berhasil dicapai dengan rata-rata capaian sasaran adalah 105,28%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 didorong oleh progresifnya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan, Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN), rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam lima tahun terakhir dibuktikan dengan menurunnya laju kerusakan hutan dalam dua tahun terakhir sebesar 12,45% pada Tahun 2019 dan 14,73% pada Tahun 2020 dari laju kerusakan hutan pada Tahun 2016 yang dijadikan *baseline* untuk penghitungan laju kerusakan hutan hingga Tahun 2021.

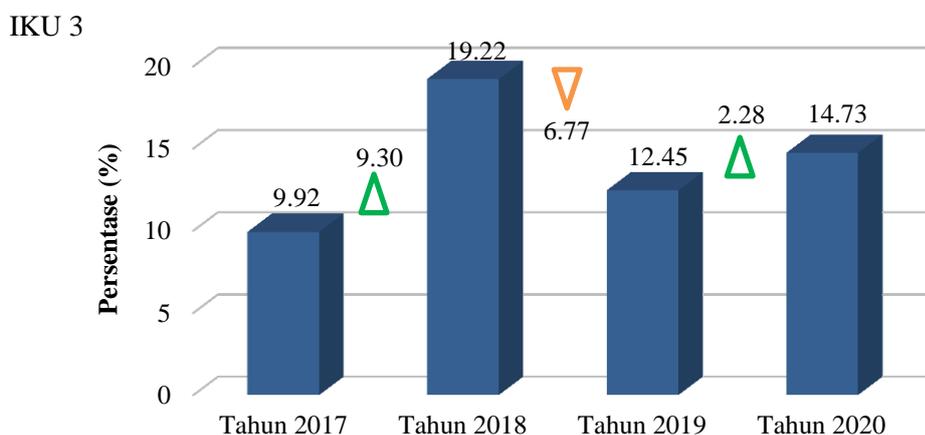
Sasaran kinerja ini cenderung bersifat teknokratis dan metodologis mengingat indikator yang dipakai memiliki parameter yang bersifat kasuistis (situasional) dan tergantung pada faktor yang tidak dapat dikontrol dalam perencanaan, sebagai contoh kebakaran hutan merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan kerusakan hutan secara cepat dan tanpa dapat dikontrol dalam perencanaan karena sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim yang saat ini sangat ekstrim. Kebakaran hutan yang luas akan sangat mempengaruhi laju kerusakan hutan disamping variabel lainnya seperti perambahan, *illegal logging*, dan perladangan.

Tabel 23. Perbandingan Capaian Kinerja Menurunnya Laju Kerusakan Hutan Tahun 2020 dan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2020	Target 2019	Tahun 2020 (n)		Tahun 2019 (n-1)	
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Menurunnya Laju Kerusakan Hutan	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	14%	12%	14,73%	105,28	12,45%	103,75

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indikator Kinerja 3 yaitu persentase penurunan laju kerusakan hutan dapat direalisasikan 14,73% atau naik sebesar 2,28% dari realisasi tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika dilihat dari target kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020, penurunan laju kerusakan hutan dapat ditekan lebih rendah dari *baseline* Tahun 2016.

Capaian kinerja Sasaran Menurunnya Laju Kerusakan Hutan Tahun 2017 - 2020 dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan (%) Tahun 2017-2020.



Gambar 9. Capaian Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan Tahun 2017-2020.

Kedua grafik di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 terjadi kenaikan angka persentase penurunan laju kerusakan hutan dari 9,92% menjadi 19,22% namun pada



capaian kinerja terjadi penurunan capaian target kinerja dari 198,40% pada Tahun 2017 menjadi 192,20% pada Tahun 2018, hal terjadi dikarenakan pada Tahun 2018 target penurunan adalah 10% sehingga angka 19,22% mencapai angka capaian kinerja sebesar 192,20%, kondisi ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2017 turun sebesar 6,20%. Tahun 2019 laju kerusakan hutan turun dari 19,22% pada Tahun 2018 menjadi 12,45% pada Tahun 2019 dan kembali naik menjadi 14,73 pada Tahun 2020. Kehilangan tutupan hutan tersebut disebabkan oleh berbagai sebab antara lain penebangan terencana (RKT IUPHHK HA/HTI), izin pinjam pakai kawasan hutan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, pembukaan hutan menjadi perladangan dan perkebunan, meluasnya permukiman masyarakat, okupasi lahan oleh masyarakat, kebakaran hutan serta bencana alam. Namun dibandingkan angka laju kerusakan hutan Tahun 2016 (base line) laju kerusakan hutan di Tahun 2020 masih jauh lebih rendah.

Tabel 24. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Laju Kerusakan Hutan s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir Renstra	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan (%)
Menurunnya laju kerusakan hutan	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	15%	14,73%	98,20

Mencermati indikator “Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” tercapai 83% dari target RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dari Tabel 24 di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target tahun kelima maka tingkat kemajuan 98,20% telah mendekati target RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 98,20%. Artinya, setiap tahun laju kerusakan kawasan hutan dapat dikendalikan dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, pengendalian kebakaran, penanaman dan upaya preventif lainnya yang dapat memperlambat laju kerusakan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 25. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Laju Kerusakan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi			Ket
		Sumbar 2020	Sumbar 2019	KemenLHK 2019	
Menurunnya Laju Kerusakan Hutan	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	14,73%	12,45%	31,09%	Lebih Rendah

Dari Tabel 25 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja 3 yaitu “Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat lebih



rendah dibandingkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Angka deforestasi Indonesia Tahun 2012-2019 sesuai data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Deforestasi Indonesia (x 1000 Ha)	610	730	400	1.090	630	480	440	470

Jika menggunakan metode penghitungan yang sama dengan penghitungan persentase penurunan laju kerusakan hutan Sumatera Barat dimana yang dijadikan baseline adalah rata-rata angka deforestasi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 yaitu 560.140 Ha/Tahun, maka penurunan laju kerusakan hutan (deforestasi) Indonesia pada Tahun 2019 jika dibandingkan dengan rata-rata deforestasi Indonesia dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 adalah 31,09%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penurunan laju kerusakan hutan Sumatera Barat. Hal ini sangat dimungkinkan dikarenakan pemerintah pusat memiliki sumber daya, baik SDM maupun pendanaan yang berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga hutan, selain juga peran pemerintah daerah dalam menjaga dan melindungi hutan dari ancaman deforestasi. Angka deforestasi Indonesia ini didapatkan dari deforestasi bruto yang merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan berhutan menjadi kelas penutupan lahan tidak berhutan, dikurangi dengan perubahan kondisi tak berhutan menjadi berhutan (reforestasi). Perbaikan tutupan hutan dan lahan telah menyumbangkan indeks tutupan hutan dan lahan.

Penurunan laju kerusakan hutan Sumatera Barat Tahun 2020 naik sebesar 2,28% dari Tahun 2019 atau dengan kata lain Dinas Kehutanan berkinerja lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari perubahan tutupan lahannya, yang banyak mengalami perubahan tutupan lahan dari hutan sekunder dan hutan primer menjadi areal terbangun (pada wilayah izin IUPHHK HA/HTI), areal terbangun (jalan dan perumahan), semak belukar, areal pertanian/perkebunan, dan areal terbuka adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat akibat adanya izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan trans mentawai serta meningkatnya areal terbangun (jalan dan perumahan). Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan meningkatnya aktivitas budidaya pertanian lahan kering dan perkebunan. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Sijunjung disebabkan adanya areal budidaya pertanian/perkebunan masyarakat dan perambahan.





Tabel 26. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Laju Kerusakan Hutan dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2019		Ket
		Sumbar	Sumut	
Menurunnya Laju Kerusakan Hutan	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	12,45%	-	-

Dari Tabel 26 terlihat bahwa dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran “Menurunnya Laju Kerusakan Hutan” tidak bisa dibandingkan karena Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan data laju kerusakan hutan.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui empat program dengan pembiayaan APBD, yaitu:

- A. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam yang terdiri atas 17 kegiatan yaitu:
 1. Evaluasi keberhasilan penanaman N-5.
 2. Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
 3. Konservasi Sumber Daya Genetik.
 4. Pembuatan Bibit Tanaman Hutan.
 5. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan.
 6. Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan Lingkungan (DBH-DR).
 7. Penyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRL (DBH-DR).
 8. Pengembangan kualitas bibit dan benih tanaman hutan (DBH-DR).
 9. Pembuatan Gully Plug (DAK).
 10. Penanaman P0 (DAK).
 11. Rehabilitasi mangrove (DAK).
 12. Pembuatan Dam Penahan (DAK).
 13. Pembuatan/ Pengembangan bibit (DBH-DR).
 14. Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan (DBH-DR).
 15. Pembinaan perbenihan tanaman hutan (DBH-DR).
 16. Penyusunan Rancangan Kegiatan RHL (DBH-DR).
 17. Monitori dan evaluasi RHL (DBH-DR).
- B. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang terdiri atas 28 kegiatan yaitu:
 1. Pengamanan dan Perlindungan Hutan.
 2. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Agam Raya.



3. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Dharmasraya.
4. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari.
5. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai.
6. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya.
7. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan.
8. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Sijunjung.
9. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Solok.
10. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.
11. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota.
12. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya.
13. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya.
14. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari.
15. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota.
16. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai.
17. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya.
18. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan.
19. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung.
20. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok.
21. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.
22. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA.
23. Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan.
24. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan.
25. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
26. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.
27. Pengukuran Simpanan Karbon.
28. Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan (DBH-DR).



- C. Program Pengendalian Kebakaran Hutan yang terdiri atas 21 Kegiatan yaitu:
1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam Raya.
 2. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Dharmasraya.
 3. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Hulu Batang Hari.
 4. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Limapuluh Kota.
 5. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai.
 6. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya.
 7. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Pesisir Selatan.
 8. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Sijunjung.
 9. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Solok
 10. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan.
 11. Supervisi Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
 12. Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan (DBH-DR).
 13. Sosialisasi Dan/Atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Berbagai Macam Metode (DBH-DR).
 14. Pelatihan/Pembekalan/In House Training/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR).
 15. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
 16. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.
 17. Monitoring Dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan.
 18. Monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR).
 19. Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR).
 20. Patroli Pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR).

21. Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-Lain (DBH-DR).

Seluruh kegiatan capaian kinerjanya cukup baik, namun ada beberapa kegiatan yang capaian fisiknya tidak mencapai angka 100%, hal ini disebabkan karena ada kegiatan pada Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang bersifat situasional. Kegiatan bersifat situasional artinya pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tergantung pada kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan pada Program Pengendalian Kebakaran Hutan yang bersifat situasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemadaman dan penangan pasca kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR).

Kegiatan dengan output jumlah monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan sebanyak 11 kali tersebut, hanya dapat direalisasikan sebanyak 7 kali atau mencapai 63,64%.

2. Monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR).

Kegiatan dengan output jumlah pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan sebanyak 8 kali tersebut, hanya dapat direalisasikan sebanyak 6 kali atau mencapai 75,%%.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan kewenangan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Dinas Kehutanan diwajibkan untuk menganggarkan kegiatan tersebut. Tidak optimalnya capaian kinerja kegiatan tersebut bukan berarti kesalahan dalam perencanaan tetapi merupakan keberhasilan kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan (pre-emptif dan preventif) dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta semakin baiknya sarana dan prasarana dalam deteksi dini serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 27.

Tabel 27. Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Menurunnya laju kerusakan hutan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Menurunnya laju kerusakan hutan	a. Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	1 Evaluasi keberhasilan Penanaman N-5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5	3 Lokasi	3 Lokasi	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				2	Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Terevaluasinya kinerja pengelolaan DAS dan tersusunya dokumen DAS	1 DAS	1 DAS	100%
				3	Konservasi Sumber Daya Genetik	Terbangun/terpeliharanya sumber daya genetik	1 Laporan	1 Laporan	100%
				4	Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	Jumlah bibit yang berkualitas	30.000 Btg	30.000 Btg	100%
				5	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Sertifikasi mutu benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	1 Laporan	1 Laporan	100%
				6	Rehabilitasi lahan dan penghijauan lingkungan (DBH-DR)	Terlaksananya penanaman lahan kritis	10 KPH/Resort	10 KPH/Resort	100%
				7	Penyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRL (DBH-DR)	Tersusunya Dokumen perencanaan RPRL dan RTnRL	1 Buku	1 Buku	100%
				8	Pengembangan kualitas bibit dan benih tanaman hutan (DBH-DR)	Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya sertifikasi sumber benih tanaman hutan	50.000 btg	50.000 btg	100%
				9	Pembuatan Gully Plug (DAK)	Gully plug yang terbangun	8 unit	8 unit	100%
				10	Penanaman P0 (DAK)	Terlaksananya penanaman pada hutan/ lahan	200 Ha	200 Ha	100%
				11	Rehabilitasi mangrove (DAK)	Terehabilitasinya mangrove	6 Ha	6 Ha	100%
				12	Pembuatan Dam Penahan (DAK)	Terbangunnya Dam Penahan	8 unit	8 unit	100%
				13	Pembuatan/ Pengembangan bibit (DBH-DR)	Terlaksananya Pembuatan/ Pengembangan bibit	5.000 btg	5.000 btg	100%
				14	Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan (DBH-DR)	Terlaksananya Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan	7 Sertifikat	7 Sertifikat	100%
				15	Pembinaan perbenihan tanaman hutan (DBH-DR)	Terlaksananya pembinaan perbenihan tanaman hutan	7 Kali	7 Kali	100%
				16	Penyusunan rancangan kegiatan RHL (DBH-DR)	Rancangan kegiatan RHL yang tersedia	3 KPH/Resort	3 KPH/Resort	100%
				17	Monitoring dan evaluasi RHL (DBH-DR)	Terlaksananya monitoring dan evaluasi RHL	9 KPH/Resort	9 KPH/Resort	100%
			Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	1	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	1 Kasus	1 Kasus	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				2	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Aagam Raya	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Aagam Raya	7 Kali	7 Kali	100%
				3	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Dharmasraya	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 Kali	2 Kali	100%
				4	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Hulu Batanghari	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	3 Kali	3 Kali	100%
				5	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Mentawai	1 Kali	1 Kali	100%
				6	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	1 Kali	1 Kali	100%
				7	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasisir Selatan	4 Kali	4 Kali	100%
				8	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Sijunjung	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH sijunjung	3 kali	3 kali	100%
				9	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Solok	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Solok	2 kali	2 kali	100%
				10	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Bukit barisan	3 Kali	3 Kali	100%
				11	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola limapuluh kota	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Lima puluh Kota	10 kali	10 kali	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				12	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Wilayah kelola KPH Agam Raya yang dikonservasi	1 laporan	1 laporan	100%
				13	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Wilayah kelola KPH Dharmasraya yang dikonservasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%
				14	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang di konservasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
				15	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang di konservasi	1 lokasi	1 lokasi	100%
				16	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai	wilayah kelola KPH Mentawai yang dikonsevasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
				17	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang dikonservasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
				18	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang di konservasi	1 laporan	1 laporan	100%
				19	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Wilayah kelola KPH Sijunjung yang dikonservasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
				20	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok	Wilayah kelola KPH Solok yang di konservasi	1 laporan	1 laporan	100%
				21	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang di konservasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
				22	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1 laporan	1 laporan	100%
				23	Penyusunan peta laju kerusakan hutan	Peta laju kerusakan hutan	1 laporan	1 laporan	100%
				24	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan	Pengembangan Poternsi Jasa lingkungan yang di fasilitasi	1 laporan	1 laporan	100%
				25	Pengelolaan Keanekaragaa n Hayati dan Ekosistem	Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	1 unit	1 unit	100%
				26	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terlaksananya monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca	1 Lap	1 Lap	100%





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
					bidang kehutanan				
				27	Pengukuran simpanan karbon	Tersedianya data simpanan karbon	1 Laporan	1 Laporan	100%
				28	Pengendalian dan pencegahan kerusakan hutan dan kawasan hutan (DBH-DR)	Patroli/operasi gabungan pengamanan hutan/TPHT	68 Kali	68 Kali	100%
			Program Pengendalian Kebakaran Hutan	1	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam Raya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Agam Raya	10 Kali	10 Kali	100%
				2	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Dharmasraya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Dharmasraya	17 Kali	17 Kali	100%
				3	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Hulu Batang Hari	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	10 Kali	10 Kali	100%
				4	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Limapuluh Kota	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Limapuluh Kota	10 Kali	10 Kali	100%
				5	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai	Jumlah patroli, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Mentawai	8 Kali	8 Kali	100%
				6	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya	Patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Pasaman Raya	8 Kali	8 Kali	100%
				7	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Pesisir Selatan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Pesisir Selatan	6 Kali	6 Kali	100%
				8	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Sijunjung	9 Kali	9 Kali	100%





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				Sijunjung				
9				Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Solok	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Solok	8 Kali	8 Kali	100%
10				Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan	12 Kali	12 Kali	100%
11				Supervisi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah supervisi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1 Kali	1 Kali	100%
12				Pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	Jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan yang tersedia	17 Unit	17 Unit	100%
13				Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai macam metode (DBH-DR)	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	210 Orang	210 Orang	100%
14				Pelatihan/ pembekalan/ in house training/ penyegaran/ bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan(DBH-DR)	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan	60 Orang	60 Orang	100%
15				Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	31 Kali	31 Kali	100%
16				Pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan	13 Kali	13 Kali	100%
17				Monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan	Jumlah monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan	18 kali	18 kali	100%
18				Monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran	Jumlah monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan	11 Kali	7 Kali	63.64%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				hutan dan lahan (DBH-DR)	dan lahan			
				19 Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	Jumlah pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan	8 Kali	6 Kali	75.00%
				20 Patroli Pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	Jumlah Patroli Pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	18 Kali	18 Kali	100%
				21 Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain (DBH-DR)	Jumlah koordinasi melalui kunjungan kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan	39 Kali/ 60 Orang	39 Kali/ 60 Orang	100%

Uraian capaian indikator “Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” Sasaran Strategis 2 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) ”Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” memiliki target sebesar 14%, terealisasi sebesar 14,73% dengan tingkat capaian 105,28% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator kinerja tersebut di atas diukur dengan menghitung dengan formula **((laju kerusakan hutan Tahun n - laju kerusakan Tahun 2016 (data base))/laju kerusakan hutan Tahun 2016 (data base)) x 100%**. Dari perubahan tutupan lahan Tahun 2016 dan Tahun 2020 diperoleh kerusakan hutan Sumatera Barat adalah 51.162 Ha dalam 4 (empat) tahun, yang juga berarti laju kerusakan hutan adalah setara dengan 12.790 Ha/Tahun atau turun 342 Ha/Tahun dibandingkan dengan Tahun 2019. Sesuai dengan dokumen SRAP REDD+ yang disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan analisis data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laju kerusakan hutan Tahun 2016 terhitung adalah sekitar 15.000 Ha/Tahun, di mana angka ini merupakan data base untuk penghitungan penurunan laju kerusakan hutan hingga Tahun 2021.

Capaian Target IKU Persentase penurunan laju kerusakan hutan Tahun 2020 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti yang terdapat pada Tabel 28.

Tabel 28. Capaian Target IKU Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan per Triwulan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Menurunnya laju kerusakan hutan	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	0%	0%	0%	14%	0%	100	0%	100	0%	100	14,73%	105,28

Capaian indikator tersebut di atas pada setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target indikator “Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti penanaman, patroli simpatik pengamanan hutan, penyusunan perda pengamanan dan perlindungan hutan, penyidikan dan pengamanan hutan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan satuan tugas pengamanan dan perlindungan hutan melalui kerangka PPHBN (Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat). Berdasarkan rekapitulasi data tutupan lahan Tahun 2017 hingga Tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 29.

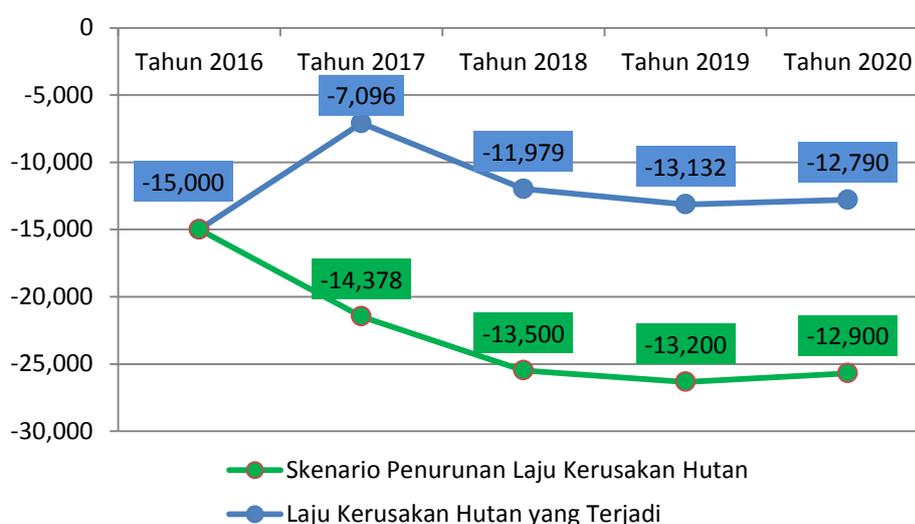
Tabel 29. Tutupan Lahan Kawasan Hutan (Ha) Tahun 2017 hingga Tahun 2020

No	Kabupaten	Luas TH 2017	Deforestasi 2018	Luas TH 2018	Deforestasi 2019	Luas TH 2019	Deforestasi 2020	Luas TH 2020
1	Kab. Agam	56,657	206	56,451	169	56,282	58.605	56,223
2	Kab. Dharmasraya	57,214	3,528	53,686	1,903	51,782	1430.538	50,352
3	Kab. Lima Puluh Kota	125,100	1,048	124,052	625	123,427	275.887	123,151
4	Kab. Mentawai	464,363	913	463,450	790	462,660	2649.287	460,010
5	Kab. Padang Pariaman	26,288	126	26,162	158	26,005	75.984	25,929
6	Kab. Pasaman	217,869	886	216,984	1,349	215,635	845.616	214,789
7	Kab. Pasaman Barat	75,958	637	75,321	4,361	70,959	764.613	70,195
8	Kab. Pesisir Selatan	311,659	3,020	308,639	2,276	306,362	2178.047	304,184
9	Kab. Sijunjung	128,713	242	128,471	2,144	126,327	1362.765	124,965
10	Kab. Solok	172,203	408	171,796	524	171,271	553.884	170,717
11	Kab. Solok Selatan	200,022	4,767	195,255	837	194,418	1382.887	193,035
12	Kab. Tanah Datar	42,383	11	42,372	62	42,310	55.528	42,254
13	Kota Padang	32,794	1,069	31,725	185	31,541	106.744	31,434
14	Kota Padang Panjang	354	-	354	33	321	12.909	308
15	Kota Payakumbuh	198	-	198	-	198	0.000	198
16	Kota Sawahlunto	2,325	-	2,325	19	2,306	5.851	2,300
17	Kota Solok	949	-	949	4	945	5.218	940
	Luas Total	1,915,050	16,861	1,898,189	15,440	1,882,749	11,764	1,870,984

Catatan: TH = Tutupan Hutan; Deforestasi = perubahan dari Tutupan Hutan menjadi Non Hutan

Sumber: Hasil penghitungan Tim Penghitung Laju Kerusakan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel 29 di atas dapat dilihat bahwa, deforestasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 11.764 Ha dengan laju kerusakan hutan sebesar 12.790 Ha/Tahun ((1.922.146 Ha -1.870.984 Ha)/4 Tahun). Jika dilihat dari perubahan tutupan lahannya yang banyak mengalami perubahan tutupan lahan dari hutan sekunder dan hutan primer menjadi semak belukar, areal pertanian/perkebunan, dan areal terbuka adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya. Hal ini disebabkan di tiga kabupaten tersebut terjadi perubahan penggunaan areal hutan untuk lahan budidaya pertanian/perkebunan masyarakat serta pembangunan (jalan dan permukiman). Laju penurunan kerusakan kawasan hutan di Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Perbandingan skenario target penurunan laju kerusakan hutan dengan laju kerusakan hutan yang terjadi (ha/tahun)

Dari Gambar 10 di atas diketahui bahwa, berdasarkan perubahan penutupan lahan kawasan hutan pada Tahun 2016 dan 2020, laju kerusakan hutan pada Tahun 2020 adalah 12.790 Ha/Tahun atau mengalami penurunan dari angka 15.000 pada Tahun 2016 (*base line*). Artinya pada Tahun 2020, jumlah lahan kawasan hutan yang terbuka/berubah menjadi non hutan berkurang dibandingkan dengan tahun 2016. Sehingga laju kerusakan hutan dikatakan menurun dari Tahun 2016 (*base line*). Menurunnya laju kerusakan hutan pada Tahun 2020 dibandingkan dengan laju kerusakan hutan Tahun 2016 (*base line*) merupakan hasil positif terhadap upaya untuk menekan kerusakan hutan akibat dari penebangan hutan ilegal, perambahan, kebakaran hutan dan lahan serta okupasi masyarakat. Hal lain yang ikut mendukung capaian indikator kinerja “Persentase penurunan laju kerusakan hutan” adalah:

- ✓ Pemulihan lahan kritis melalui kegiatan penanaman dan kegiatan pendukung lainnya.



Keberhasilan penanaman yang berkontribusi dalam menurunkan lahan kritis adalah penanaman yang dilakukan pada Tahun 2015. Hasil Evaluasi Tanaman Tahun N-5 disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30. Hasil Evaluasi Tanaman Tahun N-5

No	Kabupaten/ Nama Kelompok Tani	Lokasi	Luas (Ha)	Hasil Evaluasi		
				% Tumbuh	Berhasil (Ha)	Gagal (Ha)
A	Kab. Solok					
1	Kelompok Tani Pelaksana Reboisasi Rangkiang Luluhi	Jorong Kapujan Nagari Rangkiang Luluhi Kee Tigo Lurah Kab Solok	200	56,01	200	-
2	Kelompok Tani Pelaksana Minang Saiyo	Jorong Baringin Sakti Nagari Siararo Kee IX Koto Sungai Lasi Kab Solok	75	31,25	-	75
3	Kelompok Tani Pelaksana Reboisasi Rangkiang Luluhi	Jorong Kapujan Nagari Rangkiang Luluhi Kee Tigo Lurah Kab Solok	100	41,00	-	100
4	Kelompok Tani Pelaksana Reboisasi Supayang	Jorong Kubang Nan Raok Nagari Supayang Kee Payung Sekaki Kab Solok	75	64,00	75	-
5	Kelompok Tani Sirah Sepakat	Jorong Kasiak Nagari Kotosani Kee X Koto Singkarak Kab Solok	25	43,54	-	25
6	Kelompok Tani Gantiang Cerek	Jorong Binasi Nagari Kuneir Kee X Koto Diatas Kab Solok	25	-	-	25
7	Kelompok Tani Kubang Amba	Jorong Pinang Sinawa Nagari Gantung Ciri Kee Kubung Kab Solok	25	80,92	25	-
B	Kab. Sijunjung					
1	Kelompok Pelaksana Reboisasi Pengkayaan	Jorong Tanggalo Nagari Durian Gadang Kee Sijunjung Kab Sijunjung	60	58,59	60	-
		LUAS	585	375.31	360	225

Dari Tabel 30 terlihat bahwa hasil penanaman pada Tahun 2015 seluas 585 Ha dan yang termasuk kategori berhasil adalah 360 Ha sedangkan seluas 225 Ha dikatakan tidak berhasil karena jumlah tanaman baru dan tanaman asal kurang dari 700 batang per hektar. Artinya, hasil penanaman Tahun 2015 telah memberikan sumbangan pada penambahan penutupan hutan Tahun 2020 seluas 360 Ha. Dengan diketahui



jumlah pohon yang hidup dan tumbuh baik per hektar sampai Tahun 2020, maka hasil penanaman selama lima tahun yang lalu dapat mengurangi luas lahan kritis sampai Tahun 2020.

✓ **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan.**

Melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN). Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sejak Tahun 2011 hingga tahun 2019 juga telah berhasil membentuk 157 kelompok LMPHBN yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota yang terdiri atas 450 personil satgas seperti disajikan pada Tabel 31.

Tabel 31. Jumlah Kelompok Lembaga Masyarakat Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari hingga Tahun 2019 di Sumatera Barat

No.	Kabupaten	Jumlah Nagari	Jumlah Personil Satgas
1	2	3	4
1	Kabupaten Agam	16	48
2	Kabupaten Padang pariaman	15	31
3	Kabupaten Solok Selatan	16	48
4	Kabupaten Sijunjung	11	33
5	Kota Sawahlunto (Wil KPHL BB)	4	12
6	Kabupaten Pasaman	14	54
7	Kabupaten Pesisir Selatan	9	27
8	Kabupaten Pesisir Selatan (Wil KPHL BB)	3	9
9	Kabupaten Pasaman Barat	11	35
10	Kabupaten Lima Puluh Kota	8	24
11	Kab. Lima Puluh Kota (Wil KPHL Agam Raya)	1	3
12	Kab. Lima Puluh Kota (Wil KPHL BB)	1	3
13	Kabupaten Tanah Datar (Wil KPHL BB)	7	21
14	Kab. Solok dan Kota Solok (Wil KPHL BB)	4	12
15	Kepulauan Mentawai	-	-
16	Kota Padang	11	12
17	Kabupaten Dharmasraya	14	42
18	Kabupaten Solok	12	36
	Jumlah/Total	157	450



Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan. Pada Tahun 2020, anggota LMPHBN tidak mendapatkan fasilitasi bantuan insentif untuk penguatan kelembagaan PHBN karena keterbatasan anggaran pada tahun tersebut. Namun karena Lembaga Masyarakat ini sudah tersistem dan terstruktur dengan baik di lingkup nagari dengan pembinaan yang intensif dari polisi kehutanan, maka kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan masih terus berjalan. Hal tersebut dilakukan dengan tetap menjalin koordinasi, komunikasi dan penyampaian informasi terkait kejadian perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah nagari masing-masing sehingga upaya perlindungan hutan masih dapat berperan aktif dalam mengantisipasi peningkatan tindak pidana bidang kehutanan demi menjaga fungsi dan keberadaan hutan secara lestari.

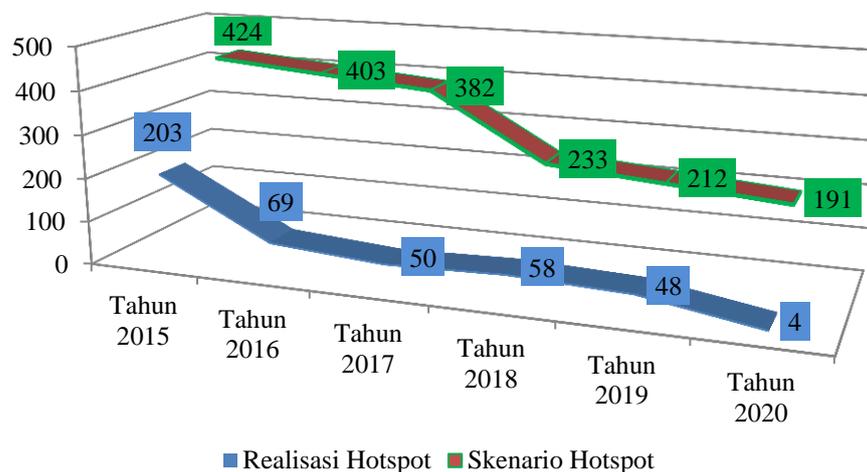
✓ **Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hotspot*).**

Pada Tahun 2020, jumlah *hotspot* yang terjadi tergolong sangat rendah dari pada skenario yang ditetapkan. Keberhasilan dalam mengendalikan jumlah *hotspot* merupakan hasil dari pengawasan dan pencegahan dini yang optimal dilakukan oleh Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Dalkarhutla) maupun pemantauan melalui satelit NOAA dalam mendeteksi titik api yang terjadi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pengaruh iklim dan curah hujan juga mempengaruhi capaian indikator kinerja ini. Koordinasi yang dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota berupaya menyiapkan diri dalam mengantisipasi terjadinya hal tersebut baik dalam upaya pencegahan maupun pengendalian kebakaran hutan dan lahan walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang ada.

Hasil pantauan titik api (*hotspot*) di Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan sangat terpengaruh dengan kondisi musim/iklim yang erat kaitannya dengan isu pemanasan global. Skenario penurunan titik panas (*hotspot*) dimulai dengan angka 424, angka ini merupakan angka rerata titik panas (*hotspot*) Tahun 2011-2015. Selanjutnya



ditetapkan target indikator kinerja yaitu penurunan titik panas (*hotspot*) sebanyak 5% pada Tahun 2016, 10% pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 target dinaikkan menjadi 45% , 50% untuk Tahun 2019 dan 55% pada Tahun 2020, maka didapatlah angka toleransi titik panas (*hotspot*) dalam bentuk skenario seperti Gambar 11.



Gambar 11. Skenario dan Realisasi *Hotspot* Tahun 2015 – 2020

Permasalahan :

1. Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih sangat terbatas sehingga penyelesaian kasus tidak bisa ditangani secara komprehensif;
2. Instrumen penegakan hukum belum maksimal untuk menangani pelanggaran dibidang kejahatan kehutanan (perambahan, illegal logging, kebakaran hutan dan lahan);
3. Pemberdayaan anggota LMPHBN belum optimal sehingga peran serta dalam perlindungan dan pengamanan hutan masih belum maksimal;
4. *Hotspot* yang terdapat di luar kawasan hutan kebanyakan disebabkan oleh pembakaran lahan budidaya, sementara partisipasi para pihak di daerah (kabupaten/kota) belum maksimal sampai ke tingkat nagari/desa.

Solusi:

1. Mengusulkan penambahan jumlah PPNS;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani pelanggaran dibidang kejahatan kehutanan;
3. Menjadikan anggota LMPHBN sebagai tenaga perlindungan dan pengamanan hutan dengan tupoksi melengkapi tenaga Polisi Kehutanan;
4. Peningkatan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan

Tujuan **Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan** dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu **Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan** dan diukur dengan satu indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Tujuan dan Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis **Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan** merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini belum memiliki akses terhadap sumberdaya alam, terutama kawasan hutan. Implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) atau Perhutanan Sosial (PS) melalui skema Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat memberikan pengakuan sosial dan pengakuan status hukum bagi masyarakat serta memberikan kejelasan dalam pengelolaan kawasan hutan serta meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik tenurial dan adat. Pencapaian kinerja sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Pencapaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	18,03	21,59	119,74
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					119,74

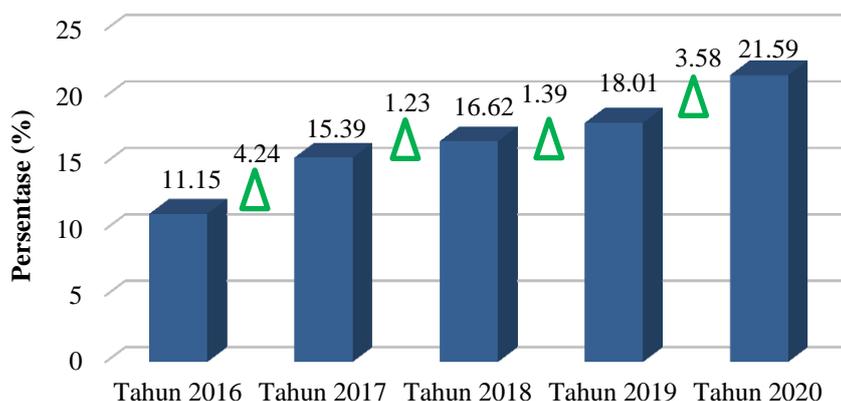
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 3 pada Tahun 2020 berhasil dicapai, dimana rata-rata capaian sasaran adalah 119,74% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 19,74% di atas adalah luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui pola HTR, HKm, dan HN pada Tahun 2020 telah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 33. Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2020 dan Tahun 2019

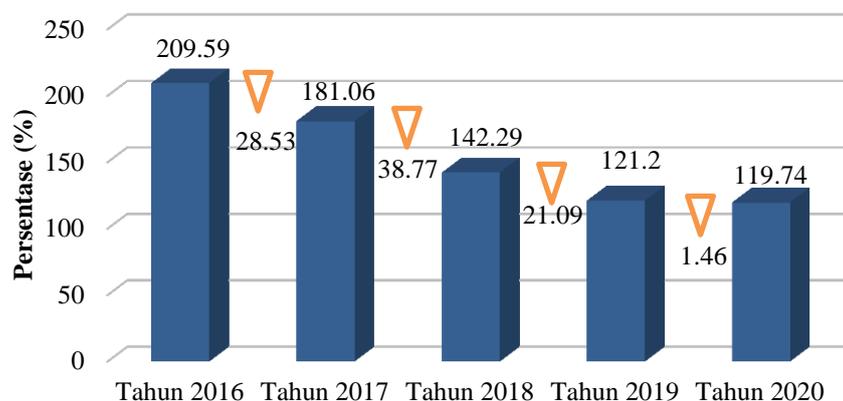
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2020	Target 2019	Tahun 2020 (n)		Tahun 2019 (n-1)	
				Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	18.03%	14,86%	21.59	119,74	18,01%	121,20

Capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” pada Tahun 2020 terealisasi 21,59% atau meningkat 3,58% dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2019. Capaian kinerja sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 13.

IKU 4



Gambar 13. Realisasi Kinerja Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan (%) Tahun 2016-2020



Gambar 14. Capaian Kinerja Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan (5) Tahun 2016-2019

Tabel 34. Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan sampai dengan Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	21,21%	21,59 %	101,79

Tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat” pada Tahun 2020 telah mendukung bahkan melampaui capaian indikator kinerja target akhir RPJMD dan atau Renstra yaitu sebesar 101,79%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kemajuan hasil pada sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” cukup signifikan sehingga pada akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan dapat melebihi target.

Tabel 35. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% Realisasi Tahun 2020 dan 2019			Ket
		Sumbar 2020	Sumbar 2019	KemenLHK 2020	
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	21,59	18,01	4,49	Lebih tinggi

Dari Tabel 35 dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator di atas jika dibandingkan dengan target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masyarakat sekitar hutan kini merasakan kehadiran pemerintah, yaitu dengan adanya Perhutanan Sosial. Diakhir Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 12,7 juta Ha kawasan hutan dapat diakses oleh masyarakat di 25.863 desa yang sebagian besar kehidupannya tergantung pada hutan. Kinerja Perhutanan Sosial se-Indonesia pada Tahun 2020 adalah kawasan hutan yang sudah diakses oleh masyarakat seluas 4.417.938 Ha atau 34,78% dari target renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lima skema Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan yang terakhir adalah skema Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. dibandingkan dengan jumlah luas hutan lindung dan hutan produksi Indonesia sekitar 98.498.522,73 Ha, maka diketahui bahwa persentase luas hutan Indonesia yang dikelola oleh masyarakat adalah 4,49%. Sumatera Barat dengan luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi 1.521.216 Ha dan luas hutan yang sudah dikelola oleh masyarakat seluas 328.369 Ha, maka persentase luas hutan yang dikelola oleh masyarakat Sumatera Barat adalah 21,59%. Keberhasilan Sumatera Barat akan berkontribusi pada target pencapaian pada tingkat nasional.

Tabel 36. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan di Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2019		Ket
		Sumbar	Sumut	
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	21,59%	2,73%	Lebih Tinggi

Dari Tabel 36 dapat dilihat, capaian indikator tersebut di atas Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, NGo dan akademisi. Dari luas hutan lindung dan hutan produksi Provinsi Sumatera Utara seluas 2.628.786 ha, luas hutan yang dikelola oleh masyarakat Sumatera Utara seluas 71.068,36 ha terdiri dari Hutan Tanaman Rakyat 15.891,61 Ha, Hutan Desa 11.682,32 Ha, Hutan





Kemasyarakatan 35.171,00 Ha, Kemitraan Kehutanan 5.929,60 Ha dan Hutan Adat 2.393,83 Ha.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui dua program yang terdiri atas satu program dengan pembiayaan APBD. Program dimaksud adalah:

Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan yang terdiri atas 30 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Kehutanan.
2. Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya.
3. Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya.
4. Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung.
5. Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Solok.
6. Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya.
7. Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari.
8. Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota.
9. Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.
10. Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada KPH Agam Raya.
11. Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada KPH Pasaman.
12. Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada KPH Sijunjung.
13. Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada KPH Dharmasraya.





14. Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada KPH Pesisir Selatan.
15. Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada KPH Hulu Batang Hari.
16. Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada KPH Lima Puluh Kota.
17. Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada KPH Bukit Barisan.
18. Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada KPH Solok.
19. Kegiatan Supervisi, Bintek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat.
20. Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya.
21. Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.
22. Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya.
23. Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai.
24. Kegiatan Supervisi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove.
25. .Kegiatan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan.
26. Kegiatan Metode dan Materi Penyuluh Kehutanan (DBH-DR).
27. Kegiatan Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan, dan Kelola Usaha (DBH-DR).
28. Kegiatan Pendampingan Kegiatan RHL oleh Penyuluh Kehutanan (DBH-DR).
29. Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Dalam Rangka RHL (DBH-DR).





30. Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial Dalam Bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat dan Kemitraan Dalam Rangka RHL (DBH-DR).

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Komponen Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 1 sub komponen yaitu:

a. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 37.

Tabel 37. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3 Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	a. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	1	Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkatkan kapasitas SDM	1 Laporan	1 Laporan	100%
				2	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	1 Laporan	1 Laporan	100%
				3	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	1 unit	1 Unit	100%
				4	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	1 Unit	1 Unit	100%
				5	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	1 unit	1 Unit	100%
				6	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	1 Unit	1 Unit	100%
				7	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	1 unit	1 unit	100%
				8	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Solok	1 Laporan	1 Laporan	100%
				9	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang	1 Laporan	1 Laporan	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
				Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan			
				10 Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Agam Raya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Agam Raya	1 Laporan	1 Laporan	100%
				11 Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada KPH Pasaman Raya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	1 Kelompok	1 Kelompok	100%
				12 Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan Pada KPH Sijunjung	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan	100%
				13 Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Dharmasraya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 Kelompok	2 Kelompok	100%
				14 Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batang Hari	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batanghari	1 Kelompok	1 Kelompok	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
				15	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Limapuluh Kota	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%
				16	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Pesisir Selatan	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	1 Kelompok	1 Kelompok	100%
				17	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Solok	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Solok	1 Laporan	1 Laporan	100%
				18	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Bukit Barisan	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	1 Laporan	1 Laporan	100%
				19	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	1 Laporan	1 Laporan	100%
				20	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	1 Laporan	1 Laporan	100%
				21	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan	1 Laporan	1 Laporan	100%





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
					mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya				
				22	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	1 Laporan	1 Laporan	100%
				23	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan mangrove	1 Laporan	1 Laporan	100%
				24	Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan	Jumlah supervisi, Bimtek dan Pembinaan kegiatan penyiapan, pembinaan dan pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	2 Kali	2 Kali	100%
				25	Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	Meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya	1 Laporan	1 Laporan	100%
				26	Metode dan materi penyuluhan kehutanan (DBH-DR)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan temu teknis - Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan, kelola usaha KTH - Jumlah pemenang wana lestari untuk tahun 2019 tingkat Sumatera Barat	45 orang/ 15 Orang	45 orang/ 15 Orang	100%
				27	Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha (DBH-DR)	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya dari pemula menjadi madya	3 KTH	3 KTH	100%
				28	Pendampingan kegiatan RHL oleh penyuluh kehutanan (DBH-DR)	Jumlah penyuluh kehutanan yang melaksanakan identifikasi areal RHL, survey sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL dan sosialisasi kebijakan RHL oleh penyuluh kehutanan - Jumlah penyuluh kehutanan yang mengikuti FGD identifikasi areal RHL	40 orang/ 40 orang	40 orang/ 40 orang	100%
				29	Pengembangan usaha perhutanan sosial dalam rangka RHL (DBH-DR)	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang di kembangkan usahanya	50 orang/ 2 unit	50 orang/ 2 unit	100%
				30	Penyiapan perhutanan sosial dalam bentuk HKm, Hutan Desa, Hutan Adat dan Kemitraan dalam rangka RHL (DBH-DR)	Jumlah kelompok Tani Hutan yang difasilitasi pembentukan perhutanan sosial	20 Kelompok	20 Kelompok	100%

Uraian capaian IKU sasaran strategis “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” memiliki target sebesar 18,03%, terealisasi sebesar 21,59% dengan tingkat capaian 119,74% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator Kinerja Utama “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” dihitung dengan formula **luas kawasan hutan yang diusulkan hingga tahap verifikasi untuk dapat dikelola oleh masyarakat/kemitraan pada tahun N dibagi jumlah luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Sumatera Barat dikalikan angka 100%.**

Capaian Target IKU “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” Tahun 2019 setiap triwulannya dapat diuraikan pada Tabel 38.

Tabel 38. Capaian Target IKU Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat Per Triwulan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target (%)				Realisasi (%)							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	Capaian	TRW II	Capaian	TRW III	Capaian	TRW IV	Capaian
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat	5	10	14,86	18,03	14,37	287	14,37	144	14,86	100	18,03	119,74

Dari Tabel 38 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai melebihi target triwulan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HN, HTR dan HKm dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat/Kemitraan”, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan, Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR, dan HR Kemitraan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan, Penguatan Forum PHBM Provinsi Sumatera Barat, dan melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Kelembagaan serta Pengendalian PHBM.

Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses perizinan mulai dari usulan, proses verifikasi, penetapan areal kerja, dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari/Izin Pemanfaatan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/Perhutanan Sosial, yang meliputi skema Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat di luar

Hutan Rakyat yang berada pada hutan hak yang secara kumulatif hingga pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39 Rekapitulasi Luas Areal Kelola Perhutanan Sosial

No	SKEMA	PROGRES								Total
		Usulan		Verifikasi		PAK*		HPHD/ IUPH		
		Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	
1	Hutan Nagari	40	50,545.00	3.	4,499.00	-	-	99	185,138.83	142
2	Hutan Kemasyarakatan	9	5,950.00	1	2,000.00	4.	2,814.00	46	30,295.00	60
3	Hutan Tanaman Rakyat	-	-	2	800.00	-	-	4	6,935.00	6
4	Kemitraan Kehutanan	23	11,915.34	1	202.00	-	-	3	435.08	27
5	Hutan Adat**	14	19,898.00	-	-	-	-	5	6,942.00	19
	TOTAL***	86	88,308.34	7	7,501.00	4	2,814.00	157	229,745.91	254
										328,369.25

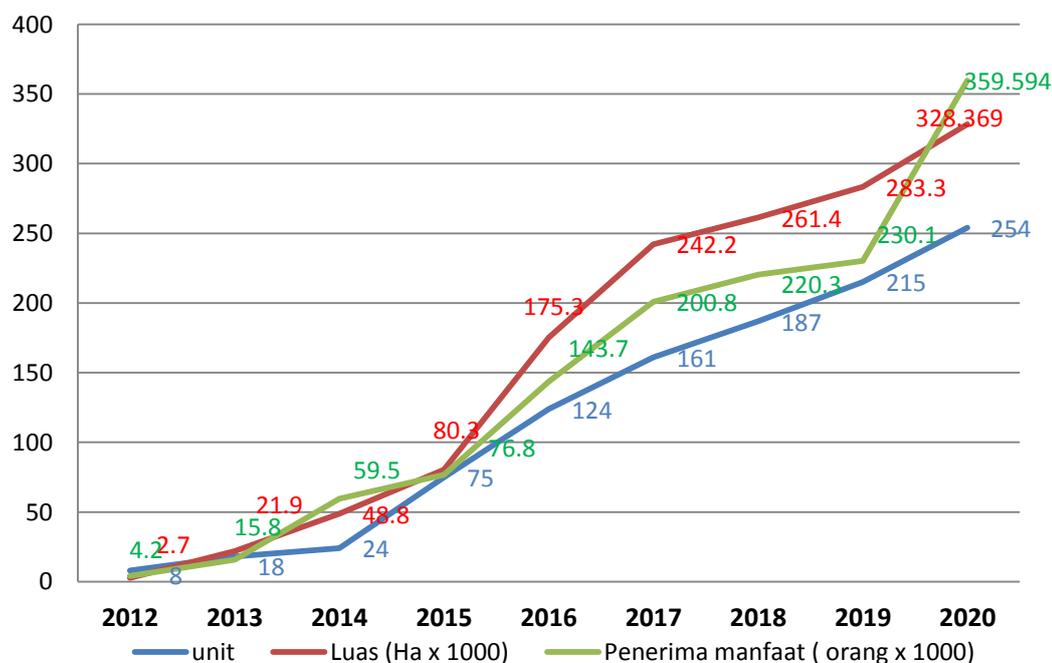
Catatan: * PAK (Penetapan Areal Kerja) terhitung awal 2017 sudah tidak ada lagi.

**HA= Hutan adat

***Rincian Unit, luas dan lokasi Perhutanan Sosial secara keseluruhan

Sumber data: Data olahan Bidang PPMHA

Dari Tabel 39 di atas terlihat bahwa merunut progresnya dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam Gambar 15.



Gambar 15. Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Sembilan Tahun Terakhir



Dari Gambar 15 di atas terlihat perkembangan Perhutanan Sosial di seluruh tahapan proses baik usulan, verifikasi, PAK dan Hak Pengelolaan/Izin pemanfaatan secara kumulatif dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir, perkembangan menggemblirakan pada komponen luas areal kelola dan penerima manfaat dari pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat. Dua komponen ini erat kaitannya dengan skema perhutanan sosial yang ada. Peningkatan unit hutan nagari akan berkorelasi lurus dengan luas areal kelola dan penerima manfaat, mengingat batasan luasan untuk skema hutan nagari bisa seluruh kawasan hutan lindung dan produksi di wilayah administrasi nagarinya, disamping personal/masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan nagari akan lebih terbuka dibanding dengan skema HKm dan HTR yang memang terbatas pada jumlah anggota kelompok masing-masing HKm atau HTR. Peningkatan perkembangan yang nyata di tiga tahun terakhir merupakan hasil kontribusi dari berbagai pihak terkait yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Faktor lain yang mendukung percepatan perluasan dan pengembangan Perhutanan Sosial di Tahun 2020 adalah dukungan dari berbagai lembaga dan LSM yang memungkinkan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat mendorong percepatan fasilitasi usulan Perhutanan Sosial melalui penyelenggaraan monitoring dan evaluasi progres fasilitasi usulan, *workshop* fasilitasi usulan, rapat koordinasi Pokja, pengembangan usaha, pelatihan dan sekolah lapang peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pendamping Perhutanan Sosial, pengukuran karbon, pohon asuh, penyelenggaraan kampanye Perhutanan sosial melalui jurnalisme warga, peliputan dan dokumentasi praktek-praktek pengelolaan hutan yang baik serta fasilitasi pembayaran insentif jasa komunal yang menjaga kawasan hutan melalui fasilitasi pengembangan usaha di Perhutanan Sosial yang berdampak positif bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara ekologis, studi primer di beberapa Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari menunjukkan bahwa setelah mendapatkan perijinan Perhutanan Sosial, kepedulian masyarakat setempat akan kelestarian hutan jauh lebih meningkat, pemahaman akan pentingnya hutan bagi penyediaan air dan pencegahan bencana longsor dan banjir juga berkembang dimasyarakat luas, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan penanaman pohon baik kayu kayuan terlebih lagi pohon buah buahan (HHBK). Hal ini bisa dilihat dari permintaan bibit tanaman dari lembaga/kelompok Perhutanan Sosial yang cenderung meningkat tiap tahunnya berdasarkan laporan UPTD BSPTH dan UPT BPDAS.





Secara sosial, di nagari yang mengembangkan perhutanan sosial juga berlangsung proses penyepakatan dan konsolidasi sosial sehingga menghasilkan kepastian pengelolaan terhadap tanah (hutan) yang dapat meminimalisir konflik tenurial dan memperlerat hubungan sesama anggota masyarakat yang pada akhirnya menciptakan ketahanan sosial.

Dampak dan manfaat lain yang bersentuhan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, terutama dari aktivitas pasca perijinan melalui fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial, dapat diilustrasikan dari studi kasus primer secara langsung melalui wawancara dengan pengelola di beberapa Hutan Nagari dan Hutan kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Studi pendapatan dari usaha ekowisata LPHN Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, semenjak usaha ekowisata Rumah Pohon Puncak Kayu Manang dan Air Terjun Sarasah Kua dibuka, rata rata kunjungan wisata perbulan kurang lebih 1.050 orang dengan rincian pengunjung hari kerja kurang lebih 50 orang dan hari libur sabtu/minggu antara 100 sampai dengan 300 orang, dengan membayar retribusi Rp. 5.000,- per orang dan jasa pemandu Rp. 30.000,- per kelompok (2 sampai 8 orang) sekali trip perjalanan maka LPHN telah mendapatkan penghasilan antara Rp. 9.000.000,- sampai dengan Rp. 13.200.000,- perbulannya. Nilai ini belum dihitung dari penjualan cenderamata gelang rasam, konsumsi, minuman, dan makanan yang dijual oleh masyarakat. Bila ada paket wisata menginap akan lebih tinggi lagi pendapatan masyarakat Sungai Buluh.
2. Studi pendapatan di unit usaha ekowisata kepala banda dan taman pinus wakanda LPHN Taram Kabupaten 50 Kota menunjukkan bahwa pendapatan dari penerimaan retribusi parkir dan tempat wisata dalam kurun waktu 3 bulan (September, Oktober, November 2019) telah mampu mencapai kurang lebih Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau rata rata Rp. 20.000.000 per bulan, bahkan dalam waktu libur akhir pekan/liburan pengunjung bisa mencapai 3.000 orang seharusnya. Belum lagi pendapatan yang diperoleh masyarakat setempat dari penjualan makanan, minuman, produk sereh wangi, jamur tiram dan cendera mata.
3. Studi pendapatan usaha penyewaan kapal boat dan penyediaan listrik melalui pembangkit listrik mikro hidro di Hkm Patamuan, berdasarkan hitungan kasar ketua kelompok Hkm penghematan dari belanja BBM untuk penerangan per hari per KK yang telah dialiri listrik antara 2½ hingga 6 liter perminggu tergantung jenis lampu yang di pakai bila rata rata 3 liter x 48 KK yang teraliri perminggu menghabiskan 144 liter per minggu atau 576 liter per bulan bila harga BBM di patamuan berkisar



Rp. 15.000 maka per bulan telah dihemat belanja Rp. 8.640.000, ditambah usaha penyewaan boat rata rata 2 trip per hari x Rp. 800,000 s/d 1.000.000, maka dalam satu bulan kelompok mendapatkan tambahan penghasilan antara Rp. 48.000.000 s/d Rp. 60.000.000, bila dikurangi biaya operasional per tripnya 600.000 maka kelompok mendapatkan tambahan penghasilan antara Rp. 6.000.000 hingga Rp. 12.000.000 per bulan.

4. Studi Pendapatan Usaha gula Aren di HKm Karya Setia berdasarkan pengakuan ketua kelompok (Desrawardi) Kelompok mendapat tambahan pendapatan dari proses gula semut kurang lebih antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 8.000.000, perbulan setelah dikurangi biaya produksi.
5. Studi Pengembangan Ternak Sapi/Kerbau di Hutan Nagari Pekan Rabaa, Pasir Talang Timur, Paru dan Hutan Kemasyarakatan Pasir Laweh secara sederhana telah menghasilkan pupuk organik dan tambahan jumlah ternak antara 3 s/d 4 ekor pertahun dengan rata rata hasil antara Rp. 20.000.000 s/d Rp. 35.000.000 pertahun disamping pemanfaatan kompos dan pupuk anorganik dari kotoran ternak.

Selain dampak ekonomi dari aktivitas pasca perijinan melalui fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mencoba meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat melalui Dana Insentif Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 794.400.000,- yang di alokasikan pada kegiatan pengembangan kemitraan kehutanan untuk pembuatan *Climbing water fall* & Sepeda Gantung di Nagari Lakitan Tengah, rumah pohon dan jembatan gantung di Nagari Pelangai Gadang, pengembangan Kelompok Budidaya Jamur Tiram dan pembangunan *flying fox* di HKm Sungai Tuo Nagari Tanjung Labuah, pengembangan Kelompok Budidaya Lebah Madu di KTH Bintungan Saiyo Nagari Sijunjung, Budidaya Lebah Madu di KTH Beringin Lama Nagari Padang Gelugur, pengembangan sarana wisata di HKm Beringin Sakti Nagari Lansek Kadok serta pengembangan alat pengolahan rotan di HKm Marguna Alam Nagari Batahan.

Alokasi Dana Insentif Daerah tersebut pada beberapa lokasi telah memberikan dampak bagi pemulihan ekonomi di daerah dalam bentuk dukungan terhadap industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan hasil sebagai berikut:

1. UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Dana Insentif Daerah (DID) Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah telah membangun Jembatan Gantung dan Rumah Pohon di lokasi Air Terjun



Pelangai Gadang. Pengelolaan objek wisata alam ini dikerjasamakan antara Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) (Aie Terjun) Pelangai Gadang dengan UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sesuai PermenLHK No:P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017. Perjanjian Kerja Sama sudah ditandatangani antara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Direktur BUMNag melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor: 522.1/2448/PRPH-2020 Nomor: 04/BAT-PG/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 (Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Luas 1.000 Ha, Jangka Waktu 10 tahun). Sejak beroperasi dari tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 objek wisata alam dengan wahana baru ini telah dikunjungi oleh 12.727 pengunjung dengan penghasilan bagi BUMNag mencapai Rp. 27.588.000,-.

2. UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Dana Insentif Daerah (DID) Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah telah membangun Pos Jaga, Portal, Gapura dan *Flying Fox* di daerah wisata Puncak Koto Panjang yang merupakan unit usaha dari HKm Beringin Sakti berlokasi di Jorong Koto Panjang Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan. Selama 3 (tiga) bulan beroperasi, wisata ini menghasilkan pendapatan Rp. 4.500.000,- dengan jumlah pengunjung setiap bulan 1.500 orang, dimana tiket masuk yang dikenakan adalah Rp. 3.000,-.
3. Pada Tahun 2020, UPTD KPHL Sijunjung (Unit V) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyediakan sarana prasarana pendukung ekonomi produktif melalui Dana Insentif Daerah (DID) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor potensi hutan yaitu pengadaan alat pengolahan jamur tiram dan alat *flying fox* di HKm Sungai Tuo Nagari Tanjung Labuah Kec. Sumpur Kudus serta stup log lebah trigona di KTH Bintuangan Nagari Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Pemasangan sarana wisata *flying fox* dilakukan di objek wisata Gunuang Tombuok yang merupakan wilayah perizinan HKm Sungai Tuo. Minat kunjungan masyarakat dengan adanya sarana wisata ini meningkat dari yang sebelumnya yang hanya 100 orang kunjungan dalam satu bulan, saat ini menjadi sekitar 600 orang. Dari segi pendapatan, penghitungan nilai ekonomi akan dilakukan mulai bulan Februari 2021 setelah *launching* penggunaan oleh Pemerintah Nagari Tanjung Labuah, sekaligus sejalan dengan terbitnya Peraturan Nagari rentang Retribusi. Sedangkan alat ekonomi produktif pembuatan jamur tiram akan menjadi sarana bagi kaum ibu di Nagari Tanjung Labuah untuk

berperan aktif memberikan kontribusi penghasilan keluarga. Untuk sarana stup log lebah trigona sebanyak 20 unit di KTH Bintuangan diharapkan menjadi sumber pendapatan melalui penjualan madu, dimana saat ini penjualan untuk 1 kg madu mencapai Rp. 300.000/kg. Produksi madunya diharapkan Februari Tahun 2021 telah dapat dipanen. Harapan KPHL Sijunjung dan masyarakat tentunya, alat ini dapat berkontribusi dalam menambah alternatif pendapatan masyarakat.

Dampak peningkatan pendapatan tersebut di atas merupakan bagian kecil dari manfaat yang diterima oleh lembaga/kelompok disamping manfaat lain yang jauh lebih besar, usaha usaha lain seperti agroforestri, peternakan sapi, beras organik, kemiri, kerajinan, makanan, air mineral dan lainnya yang belum dapat diukur peningkatan pendapatannya juga merupakan tambahan manfaat yang patut diperhitungkan.

Mengingat dampak dan manfaat yang besar maka perlu jaminan bahwa pelayanan pemberdayaan masyarakat akan kelola hutan dan perijinan perhutanan sosial perlu kejelasan dan kepastian tata waktu yang bisa dilaksanakan dalam sebuah standart operasional pelayanan (SOP), untuk memastikan pelaksanaan SOP berjalan sesuai aturan dan berkembang sesuai dinamika kebutuhan pelayanan proses maka penting untuk terus mengimplementasikan substansi ISO dalam pelayanan fasilitasnya.

Keberhasilan Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 telah menghantarkan Sumatera Barat yakni Syofrawandi Ketua HKM dan Wali Nagari Indudur mendapatkan Penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan dimana sebelumnya mendapatkan penghargaan Tokoh Perhutanan Sosial Tahun 2019.



Gambar 16. Penyerahan Penghargaan Kalpataru Tahun 2020



Permasalahan:

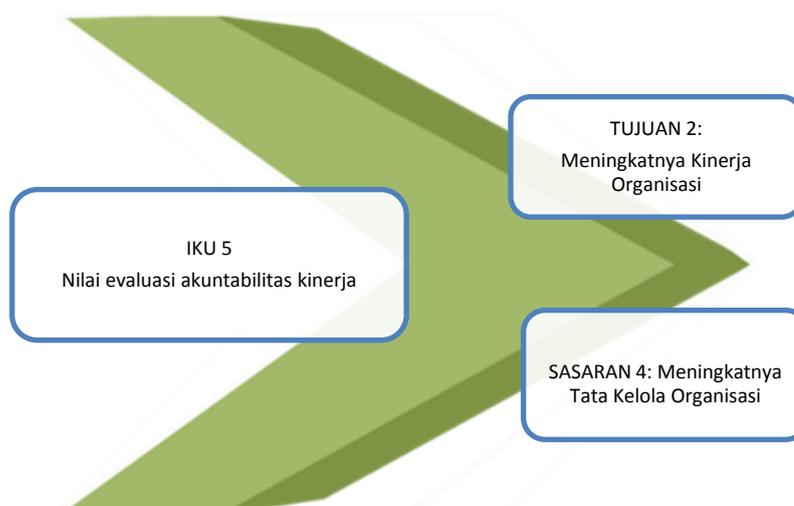
1. Belum optimalnya internalisasi Perhutanan Sosial di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Masih kurangnya peningkatan sumber daya yang memadai terkait pengembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat.
3. Belum optimalnya penguatan kelembagaan terhadap lembaga/kelompok Perhutanan Sosial yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan sehingga upaya menjalin kerjasama pengembangan Perhutanan Sosial dengan lembaga/intansi terkait, Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan kalangan Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swasta) belum optimal.
4. Belum maksimalnya dukungan regulasi/kebijakan dan aturan khusus Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat sebagai payung hukum dalam peningkatan anggaran dan peran serta Lembaga/OPD lain dalam Perhutanan Sosial.

Solusi:

1. Melaksanakan internalisasi Perhutanan Sosial kedalam seluruh Unit kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat bersinergi dalam mendorong percepatan akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
2. Memastikan peningkatan kapasitas unit kerja, sarana, dan sumber daya manusia serta pembiayaan yang memadai untuk menjamin perluasan dan pengembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat dapat berkesinambungan.
3. Penting untuk penguatan lembaga/kelompok Perhutanan Sosial agar dapat beroperasi dan memiliki unit usaha yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga upaya menjalin kerjasama pengembangan Perhutanan Sosial dengan lembaga/intansi terkait, Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan kalangan Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swasta) mutlak terus di dorong dan diperluas.
4. Perlu regulasi/kebijakan dan aturan khusus Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat yang memadai dan menjadi payung hukum dalam peningkatan anggaran dan peran serta Lembaga/OPD lain dalam Perhutanan Sosial.

IV. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Tujuan “**Meningkatnya Kinerja Organisasi**” dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan diukur dengan satu indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Tujuan dan Sasaran Strategis 4.

Tujuan “Meningkatnya Kinerja Organisasi” merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja setiap tahun.

Tujuan ini dapat dicapai dengan “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat”. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 40.

Tabel 40. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB (79)	A (82,58)	104,53
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					104,53

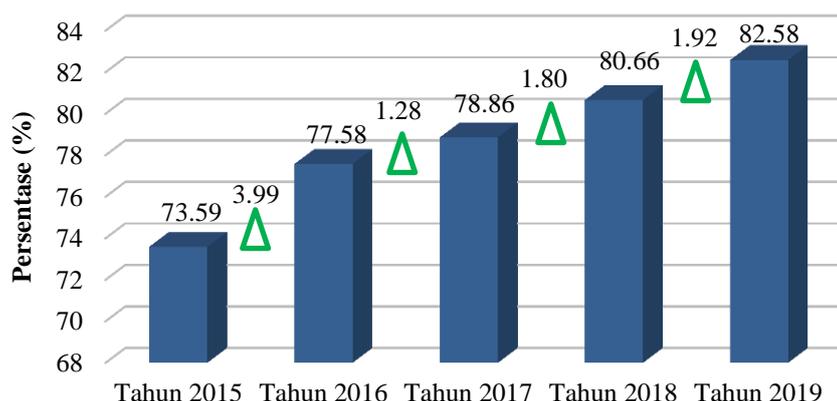
Dari Tabel 40 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis IV pada Tahun 2020 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran adalah 104,53% atau lebih tinggi dari rata-rata capaian tahun lalu dan termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 104,53% di atas adalah tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mencapai tata kelola organisasi yang efektif karena masih dalam kategori sangat baik.

Tabel 41. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019

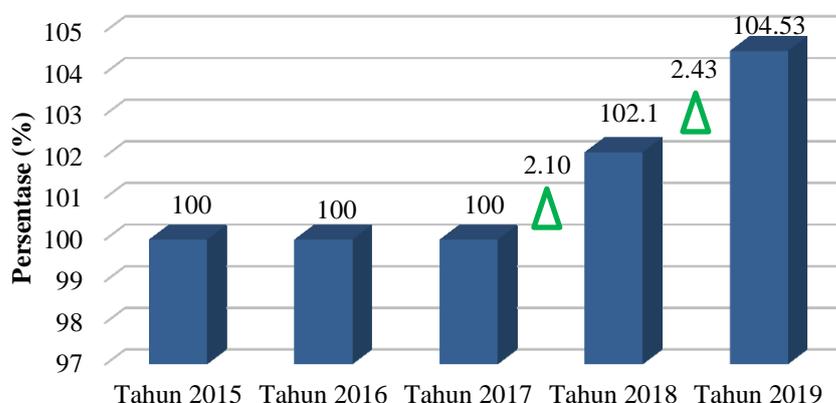
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2020	Target 2019	Tahun 2020 (n)		Tahun 2019 (n-1)	
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	A	104,53	A	102,10

Dari Tabel 41 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” Tahun 2020 lebih tinggi 2,43% dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2019, yaitu A. Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran. Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 18 dan 19.

IKU 5



Gambar 18. Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas (%) Tahun 2015 s.d Tahun 2019



Gambar 19. Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019

Tabel 42. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	A	104,53

Tabel 42 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja” pada Tahun 2019 telah melebihi capaian indikator kinerja target akhir RPJMD dan atau Renstra yaitu sebesar 104,53%. Namun, capaian ini tidak berarti capaian akhir RPJMD dan atau Renstra telah tercapai dengan terealisirnya tingkat kemajuan terhadap capaian akhir RPJMD dan atau Renstra sebesar 100%. Karena capaian akhir RPJMD dan atau Renstra akan tercapai, jika hingga Tahun 2021, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat minimal BB setiap tahunnya.

Tabel 43. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2019		Ket
		Sumbar	Sumut	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A (82,58)	-	-

Dari Tabel 43 dapat dilihat bahwa capaian indikator “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja” Provinsi Sumatera Barat belum dapat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja A pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat artinya kinerja pada tahun tersebut sudah memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui delapan program yang terdiri atas enam program dengan pembiayaan APBD, program dimaksud adalah:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri atas 12 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor.
5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.



8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
 10. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi.
 12. Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri atas 8 kegiatan yaitu:
1. Pengadaan Mubelair
 2. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri atas 1 kegiatan yaitu:
1. BinteK Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri atas 6 kegiatan yaitu:
1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 3. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD.
 4. Penatausahaan Keuangan SKPD
 5. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
 6. Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD
- F. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang terdiri atas 3 kegiatan yaitu:
- a. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan
 - b. Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan
 - c. Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 44.

Tabel 44. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 4 Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1	Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	1 Lap	100%	
				2	Pengembangan data dan informasi kehutanan	Terlaksananya pengembangan data dan informasi kehutanan	1 Laporan	1 Lap	100%	
				3	Penyusunan neraca sumber daya hutan	Tersedianya data neraca sumber daya hutan	1 Buku	1 Buku	100%	
				Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan	10 UPTD KPH	10 UPTD KPH	100%
					2	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	5 dok	5 Dok	100%
					3	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Honorarium pengelolaan aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	12 bulan	12 bulan	100%
					4	penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPI dan Lapoan Tahunan yang tersusun	5 dok	5 Dok	100%
					5	Penatausahaan keuangan OPD	Honor KPA, PPTK, dan PA serta Pengelola keuangan OPD lainnya yang terbayarkan	12 bulan	12 Bulan	100%
					Pelayanan administrasi perkantoran	1	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan	12 bulan
			2	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	12 Bulan	12 bulan	100%	
			3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 Bulan	12 bulan	100%	
			4	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi		Publikasi kegiatan OPD yang tersedia	12 Bulan	12 bulan	100%	
			5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Pembayaran tagihan rekening pajak bumi, bangunan, asuransi bangunan dan kendaraan yang terpenuhi	13 unit	13 Unit	100%	
			6	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan		Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang	13 Bulan	13 bulan	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
				dan Sopir Kantor	terpenuhi			
				7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan air, listrik, dan telekomunikasi OPD terpenuhi	12 Bulan	12 bulan	100%
				8 Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Wirid kantor dan kegiatan senam kantor	12 Bulan/4 Kali	12 Bulan/4 Kali	100%
				9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 Bulan	12 bulan	100%
				10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	12 bulan	100%
				11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Pertemuan/rapat yang diselenggarakan	12 Bulan	12 bulan	100%
				12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah yang diikuti	12 Bulan	12 bulan	100%
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	100%
				2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	12 Bulan	12 bulan	100%
				3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	158 unit	158 unit	100%
				4 Pengadaan Mebeleur	Kebutuhan mebeleur yang terpenuhi	17 Unit	17 unit	100%
				5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	20 Unit	20 unit	100%
			Peningkatan disiplin aparatur	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	458 Orang	458 orang	100%
			Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparat sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis	2 Kali	2 Kali	100%

Uraian capaian IKU sasaran strategis “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” memiliki target BB, terealisasi A dengan tingkat capaian 104,53% termasuk kategori memuaskan. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan



Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan aset seperti terlihat pada Tabel 44 di atas.

Indikator Kinerja Utama “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019. Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.
2. Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
4. Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakat sekitar hutan, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
5. Penetapan prosedur kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan, mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait yang sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 065/097/Sekr-2017 tentang Standar Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Januari 2017. SOP AP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 135 prosedur yang meliputi seluruh unit kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, professional, dan bermoral.
7. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan barang inventaris.
8. Sistem pencatatan yang jelas, akurat, dan sederhana.
9. Sistem monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala, terukur dan hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan untuk mengambil kebijakan guna peningkatan kinerja Dinas.



10. Dilakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing unit kerja dan diberikan *reward* bagi unit kerja yang baik hasil kerjanya sebaliknya pemberian *punishment* terhadap unit kerja yang hasil kerjanya kurang baik

Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) tata kelola akan mengacu pada prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, akurasi yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat diandalkan. Penerapan prinsip transparansi dimaksudkan agar data/informasi kegiatan tata kelola pemerintahan termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja organisasi dapat diakses oleh publik. Transparansi menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya sebagaimana yang telah kami lakukan melalui website www.sumbarprov.go.id.

Prinsip partisipasi dimaksudkan agar publik dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pengambilan keputusan tata kelola, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dalam menyampaikan pendapat demi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran tata kelola pemerintah yang baik dan berkelanjutan sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui mekanisme PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Melalui PPID, masyarakat diberikan akses untuk mengetahui informasi dan dokumentasi yang terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Selain hal tersebut melalui pengembangan inovasi pelayanan publik, Dinas Kehutanan telah melakukan beberapa upaya inovasi antara lain:

1. Penerapan Sistem Layanan Elektronik Data Tematik Urusan Kehutanan (*Silek Datuak*) untuk menyediakan informasi dan dokumentasi tematik kehutanan secara interaktif.
2. Simulator Manejer untuk Perencanaan Hutan Tingkat Tapak (*Si Macan Hutan*) dirancang untuk pengelola hutan agar pengguna dapat melakukan simulasi-simulasi berbasis komputer untuk menggambarkan sistem sesungguhnya (*real system*) dalam perencanaan.
3. Safari Ramadhan Online merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah dalam menyikapi wabah Covid-19 dimana Safari Ramadhan Online diterapkan untuk memantau pelaksanaan tugas selama Bulan Ramadhan Tahun 2020.
4. Sistem Informasi Kepuasan Layanan (*Sipasan*) merupakan informasi kepuasan layanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pengisian formulir pertanyaan kepuasan layanan disediakan secara *online* yang dirancang sedemikian rupa menggunakan *google form*.

Capaian Target IKU “Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” Tahun 2020 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 45.

Tabel 45. Capaian Target IKU Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Per Triwulan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas	0%	BB	BB	BB	0%	100	A	104,53	A	104,53	A	104,53

Capaian indikator tersebut setiap triwulannya dapat dicapai sesuai target triwulan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan tata kelola organisasi dilakukan dengan terukur dan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” A, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan implementasi ISO 9001:2015, melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan melaksanakan kegiatan sesuai Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang disusun.

Rekapitulasi hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Enam Tahun Terakhir

Tahun	Perencanaan Kinerja (35%)	Pengukuran Kinerja (20%)	Pelaporan (15%)	Evaluasi Kinerja (10%)	Pencapaian Sasaran (20%)	Hasil Evaluasi	Nilai
2013	25,07	14,94	10,88	5,67	18,33	74,88	BB
2014	28,64	15,89	11,47	5,83	11,67	73,5	BB
2015	25,88	17,5	11,32	5,81	13,08	73,59	BB
2016	27,64	16,49	12,68	6,27	14,5	77,58	BB
2017	28,54	18,75	12,23	6,07	13,27	78,86	BB
2018	28,54	19,41	13,21	7,84	11,66	80,66	A
2019	28,54	20,80	13,21	7,96	12,06	82,58	A

Sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan nilai BB dan Tahun 2018 hingga saat ini memperoleh nilai nilai A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merupakan pemacu semangat seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tata kelola organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan ISO 9001:2015 secara patuh. Dalam enam tahun terakhir capaian nilai SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah baik, namun tetap perlu

ditingkatkan agar tata kelola organisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjadi sebuah sistem dengan pengendalian langsung pada sistem manajemen kerjanya untuk meminimalkan kesalahan manusia (*human error*). Dengan tata kelola organisasi yang baik, diharapkan dapat mempermudah sistem kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Aplikasi *e-budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga merupakan inovasi yang meningkatkan Sistem Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Untuk capaian sasaran strategis 4 tidak ditemukan masalah.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2020 sebagaimana Tabel 47.

Tabel 47. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN				
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)	
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Pemantapan kawasan hutan	1	Pemeliharaan batas kawasan hutan	Terpeliharanya Batas Kawasan Hutan	29,485,300	29,095,300	98.68	390,000
				2	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Dharmasraya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	261,000	261,000	100.00	-
				3	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Hulu Batang Hari	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	2,720,000	2,720,000	100.00	-
				4	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Lima puluh kota	2,790,000	2,790,000	100.00	-
				5	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Mentawai	675,000	675,000	100.00	-



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN					
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)		
				6	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pasaman Raya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	3,235,000	3,194,500	98.75	40,500	
				7	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pesisir Selatan	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	6,261,750	6,261,750	100.00	-	
				8	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Sijunjung	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH sijunjung	135,000	135,000	100.00	-	
				9	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Solok	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Solok	3,445,500	3,445,500	100.00	-	
				10	Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Jumlah supervisi pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan	3,820,200	3,820,200	100.00	-	
				11	Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	Terlaksananya Sosialisasi Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial	7,322,500	7,265,500	99.22	57,000	
		b	Nilai PNPB sektor kehutanan	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	1	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	18,728,200	18,464,400	98.59	263,800
				2	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH	1,600,000	1,600,000	100.00	-	



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN				
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)	
					Hulu Batang Hari					
				3	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	2,897,000	2,837,000	97.93	60,000
				4	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Agam Raya	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	3,468,200	3,418,200	98.56	50,000
				5	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Mentawai	5,501,000	4,136,000	75.19	1,365,000
				6	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	8,797,550	8,777,800	99.78	19,750
				7	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	2,517,000	2,337,000	92.85	180,000
				8	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK)	1,763,300	1,763,300	100.00	-



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN			
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
				Kelola KPH Sijunjung	yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Sijunjung				
9				Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan industri kehutanan	241,180,800	239,880,550	99.46	1,300,250
10				Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya	Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan termanfaatkan	10,210,000	10,079,100	98.72	130,900
11				Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya	Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan termanfaatkan	14,790,000	14,373,000	97.18	417,000
12				Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung	Jumlah petak pada wilayah KPH Sijunjung terencana dan termanfaatkan	5,211,800	4,831,800	92.71	380,000
13				Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya	Jumlah petak pada wilayah KPH Dharmasraya terencana dan termanfaatkan	25,338,000	25,188,000	99.41	150,000
14				Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari	Jumlah petak pada wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan termanfaatkan	10,979,800	10,979,800	100.00	-
15				Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota	Jumlah petak pada wilayah KPH Limapuluh Kota terencana dan termanfaatkan	8,866,600	8,640,550	97.45	226,050
16				Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai	Jumlah petak pada wilayah KPH Mentawai terencana dan termanfaatkan	28,777,700	23,457,700	81.51	5,320,000
17				Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok	Jumlah petak pada wilayah KPH Solok terencana dan termanfaatkan	9,696,100	9,606,850	99.08	89,250
18				Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan	Jumlah petak pada wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan termanfaatkan	84,159,900	83,109,534	98.75	1,050,366



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN					
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)		
				19	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola	1,405,200	1,405,200	100.00	-	
				20	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Dharmasraya yang terkelola	22,497,000	22,432,000	99.71	65,000	
				21	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola	10,385,000	10,385,000	100.00	-	
				22	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang terkelola	2,465,400	2,465,400	100.00	-	
				23	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Mentawai yang terkelola	15,903,000	13,753,000	86.48	2,150,000	
				24	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola	10,913,000	10,863,000	99.54	50,000	
				25	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola	14,280,900	14,280,900	100.00	-	
				26	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola	3,585,800	3,585,800	100.00	-	
				27	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	13,027,350	13,008,950	99.86	18,400	
				28	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola	29,209,500	29,142,900	99.77	66,600	
				29	Pengembangan Kemitraan Kehutanan	Jumlah kemitraan yang difasilitasi	805,697,200	802,580,200	99.61	3,117,000	
				30	Monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan	Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sektor Kehutanan	19,250,000	18,759,000	97.45	491,000	
2.	Menurunnya laju kerusakan hutan	a .	Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	1	Evaluasi keberhasilan Penanaman N-5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan	43,270,000	43,254,250	99.96	15,750



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN				
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)	
					yang dievaluasi pada tahun N-5					
				2	Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Terevaluasinya kinerja pengelolaan DAS dan tersusunya dokumen DAS	10,300,000	9,700,000	94.17	600,000
				3	Konservasi Sumber Daya Genetik	Terbangun/terpiliharnya sumber daya genetik	1,250,000	1,250,000	100.00	-
				4	Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	Jumlah bibit yang berkualitas	66,562,000	66,520,125	99.94	41,875
				5	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Sertifikasi mutu benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	1,840,000	1,840,000	100.00	-
				6	Rehabilitasi lahan dan penghijauan lingkungan (DBH-DR)	Terlaksananya penanaman lahan kritis	3,190,624,000	3,125,636,775	97.96	64,987,225
				7	Pembuatan/ Pengembangan bibit (DBH-DR)	Terlaksananya Pembuatan/ Pengembangan bibit	273,340,000	273,236,900	99.96	103,100
				8	Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan (DBH-DR)	Terlaksananya Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan	40,135,000	39,440,000	98.27	695,000
				9	Pembinaan perbenihan tanaman hutan (DBH-DR)	Terlaksananya pembinaan perbenihan tanaman hutan	43,161,800	42,536,350	98.55	625,450
				10	Penyusunan rancangan kegiatan RHL (DBH-DR)	Rancangan kegiatan RHL yang tersedia	50,000,000	49,999,000	100.00	1,000
				11	Monitori dan evaluasi RHL (DBH-DR)	Terlaksananya monitoring dan evaluasi RHL	550,408,200	547,572,949	99.48	2,835,251
			Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	1	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	21,165,975	21,036,950	99.39	129,025
				2	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph agam raya	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Agam Raya	15,752,150	15,725,650	99.83	26,500
				3	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph dhamasraya	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Dhamasraya	7,789,319	7,787,460	99.98	1,859
				4	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang	10,603,600	10,603,600	100.00	-



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN			
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
				wilayah kelola kph hulu batang hari	dilakukan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari				
				5 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph mentawai	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Mentawai	15,885,000	15,285,000	96.22	600,000
				6 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph pasaman raya	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	75,242,350	74,397,000	98.88	845,350
				7 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph pesisir selatan	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasisir Selatan	19,972,750	19,792,750	99.10	180,000
				8 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph sijunjung	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH sijunjung	8,633,000	8,539,800	98.92	93,200
				9 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph solok	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Solok	7,990,200	7,990,200	100.00	-
				10 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Bukit barisan	15,959,825	15,361,200	96.25	598,625
				11 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola limapuluh kota	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Lima puluh Kota	38,886,050	38,883,500	99.99	2,550
				12 Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Wilayah kelola KPH Agam Raya yang dikonservasi	1,134,200	1,134,200	100.00	-
				13 Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang di konservasi	6,343,700	6,343,700	100.00	-
				14 Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang di konservasi	14,927,175	14,789,175	99.08	138,000





No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN				
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)	
				15	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai	wilayah kelola KPH Mentawai yang dikonsevasi	1,700,000	1,700,000	100.00	-
				16	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang dikonservasi	5,572,000	5,514,100	98.96	57,900
				17	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang di konservasi	1,255,500	1,255,500	100.00	-
				18	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Wilayah kelola KPH Sijunjung yang dikonservasi	10,838,000	10,126,000	93.43	712,000
				19	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok	Wilayah kelola KPH Solok yang di konservasi	8,062,500	8,055,000	99.91	7,500
				20	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang di konservasi	15,469,000	15,274,500	98.74	194,500
				21	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam	2,220,000	2,215,500	99.80	4,500
				22	Penyusunan peta laju kerusakan hutan	Peta laju kerusakan hutan	1,186,000	1,183,000	99.75	3,000
				23	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan	Pengembangan Potensi Jasa lingkungan yang di fasilitasi	3,618,000	3,618,000	100.00	-
				24	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	14,702,500	14,481,000	98.49	221,500
				25	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terlaksananya monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan	16,907,600	16,212,600	95.89	695,000
				26	Pengukuran simpanan karbon	Tersedianya data simpanan karbon	3,675,000	3,646,000	99.21	29,000
				27	Pengendalian dan pencegahan kerusakan hutan dan kawasan hutan (DBH-DR)	Patroli/operasi gabungan pengamanan hutan/TPHT	600,000,000	582,736,750	97.12	17,263,250
			Program Pengendalian Kebakaran Hutan	1	Supervisi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah supervisi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran	4,138,700	3,973,700	96.01	165,000



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN				
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)	
					hutan dan lahan					
				2	Pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	Jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan yang tersedia	755,199,000	755,166,150	100.00	32,850
				3	Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai macam metode (DBH-DR)	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	381,000,000	372,750,800	97.83	8,249,200
				4	Pelatihan/pembekalan/in house training/penyegaran/bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan(DBH-DR)	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan	150,000,000	148,303,500	98.87	1,696,500
				5	Monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	Jumlah monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan	125,609,000	87,027,700	69.28	38,581,300
				6	Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	Jumlah pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan	125,000,000	75,060,200	60.05	49,939,800
				7	Patroli Pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	Jumlah Patroli Pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1,266,024,000	1,252,316,231	98.92	13,707,769
				8	Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain (DBH-DR)	Jumlah koordinasi melalui kunjungan kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan	200,000,000	191,209,250	95.60	8,790,750
3	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	a . Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	1	Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkatkan kapasitas SDM	41,633,350	40,634,850	97.60	998,500
				2	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	968,150	968,150	100.00	-



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN			
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
				3	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	30,804,800	30,614,800	99.38	190,000
				4	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	11,600,000	11,600,000	100.00	-
				5	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	7,690,000	7,241,400	94.17	448,600
				6	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	4,767,500	4,723,800	99.08	43,700
				7	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	7,909,000	7,629,000	96.46	280,000
				8	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Solok	2,622,700	2,622,700	100.00	-
				9	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	634,500	634,500	100.00	-
				10	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Agam Raya	8,768,000	8,377,550	95.55	390,450



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN			
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
					Kehutanan pada wilayah kelola KPH Agam Raya				
11				Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada KPH Pasaman Raya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	7,215,550	7,215,550	100.00	-
12				Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan Pada KPH Sijunjung	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Sijunjung	4,734,900	4,574,900	96.62	160,000
13				Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Dharmasraya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	3,195,000	3,165,000	99.06	30,000
14				Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batang Hari	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan	5,295,700	5,295,700	100.00	-





No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN				
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)	
					Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batanghari					
				15	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Limapuluh Kota	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	12,013,000	12,013,000	100.00	-
				16	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Pesisir Selatan	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	6,659,000	6,559,000	98.50	100,000
				17	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Solok	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Solok	8,894,000	8,870,800	99.74	23,200
				18	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Bukit	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan	954,500	954,500	100.00	-





No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN				
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)	
				Barisan	Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan					
				19	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	1,364,200	1,364,200	100.00	-
				20	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	1,426,000	1,426,000	100.00	-
				21	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	457,000	457,000	100.00	-
				22	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	1,038,500	1,038,500	100.00	-
				23	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan mangrove	1,729,000	1,615,500	93.44	113,500
				24	Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan	Jumlah supervisi, Bimtek dan Pembinaan kegiatan penyiapan, pembinaan dan pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	16,456,250	16,365,250	99.45	91,000
				25	Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	Meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya	1,350,000	1,350,000	100.00	-



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN				
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)	
				26	Metode dan materi penyuluhan kehutanan (DBH-DR)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan temu teknis - Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan, kelola usaha KTH - Jumlah pemenang wana lestari untuk tahun 2019 tingkat sumatera barat	250,000,000	237,235,200	94.89	12,764,800
				27	Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha (DBH-DR)	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya dari pemula menjadi madya	100,000,000	98,093,750	98.09	1,906,250
				28	Pendampingan kegiatan RHL oleh penyuluh kehutanan (DBH-DR)	Jumlah penyuluh kehutanan yang melaksanakan identifikasi areal RHL, survey sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL dan sosialisasi kebijakan RHL oleh penyuluh kehutanan - Jumlah penyuluh kehutanan yang mengikuti FGD identifikasi areal RHL	50,850,000	49,709,250	97.76	1,140,750
				29	Pengembangan usaha perhutanan sosial dalam rangka RHL (DBH-DR)	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dikembangkan usahanya	240,750,000	236,231,249	98.12	4,518,751
				30	Penyiapan perhutanan sosial dalam bentuk HKm, Hutan Desa, Hutan Adat dan Kemitraan dalam rangka RHL (DBH-DR)	Jumlah kelompok Tani Hutan yang difasilitasi pembentukan perhutanan sosial	200,000,000	196,808,549	98.40	3,191,451
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1	Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	1,512,400	1,512,400	100.00	-
				2	Pengembangan data dan informasi kehutanan	Terlaksananya pengembangan data dan informasi kehutanan	6,416,100	6,416,000	100.00	100
				3	Penyusunan neraca sumber daya	Tersedianya data neraca sumber daya	33,450,000	32,953,450	98.52	496,550



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN			
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
				hutan	hutan				
			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD	53,420,000	51,999,000	97.34	1,421,000
				2	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	163,311,600	160,787,760	98.45	2,523,840
				3	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	164,468,000	161,535,050	98.22	2,932,950
				4	penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	36,140,000	36,140,000	100.00	-
				5	Penatausahaan keuangan OPD	548,178,085	520,337,160	94.92	27,840,925
			Pelayanan administrasi perkantoran	1	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	17,081,500	15,723,500	92.05	1,358,000
				2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	155,000,000	154,037,850	99.38	962,150
				3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,000,000	99,977,050	99.98	22,950
				4	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	5,750,000	5,250,000	91.30	500,000
				5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	115,392,637	114,897,215	99.57	495,422
				6	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	1,686,773,927	1,659,613,620	98.39	27,160,307
				7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	593,439,920	472,200,786	79.57	121,239,134
				8	Penyediaan Jasa				
					Wirid kantor dan kegiatan				



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	KOMPOSISI ANGGARAN				
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)	
					senam kantor	87,250,000	86,970,000	99.68	280,000	
				9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	55,321,169	51,226,860	92.60	4,094,309
				10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	55,670,750	55,658,750	99.98	12,000
				11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pertemuan/rapat yang diselenggarakan	20,000,000	19,678,000	98.39	322,000
				12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah yang diikuti	108,478,300	108,083,980	99.64	394,320
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	30,500,000	30,500,000	100.00	-
				2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	415,000,000	376,922,692	90.82	38,077,308
				3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	89,750,000	47,815,000	53.28	41,935,000
				4	Pengadaan Mebeleur	Kebutuhan mebeleur yang terpenuhi	87,000,000	86,163,000	99.04	837,000
				5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	162,100,000	160,920,500	99.27	1,179,500
			Peningkatan disiplin aparatur	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	356,140,800	340,085,570	95.49	16,055,230
			Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparat sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis	11,858,200	11,117,500	93.75	740,700

Dari Tabel 47 di atas dapat dilihat bahwa serapan anggaran Tahun 2020 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, DBH-DR dan DID yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 49.128.090.104 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 30.684.822.500 kemudian menjadi Rp. 41.256.768.496 dan Rp. 15.907.790.632 pada anggaran perubahan yang terdiri atas:

- Anggaran Sumber Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2020 untuk Belanja Langsung Rp.8.592.101.000,-



- b. Anggaran Sumber Dana APBD pada Belanja Tidak Langsung Rp. 41.256.768.496 dan Belanja Langsung Rp. 6.521.289.632,-
- c. Anggaran Sumber Dana Insentif Daerah pada Belanja Langsung Rp. 794.400.000,-.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target kinerja empat sasaran strategis diatas adalah sebesar Rp 56.209.230.5,- atau 98,33% terhadap alokasi anggaran Tahun 2020. Artinya terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 955.328.625,- atau lebih rendah dari sisa anggaran tahun lalu yang mencapai Rp. 11.799.751.992,-. Sisa anggaran sebesar Rp 955.328.625,- tersebut sebagian besar merupakan sisa mati dan hasil efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Merujuk pada Tabel 47 di atas, capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berlangsung selama Tahun Anggaran 2020 dapat di ikhtisarkan sebagai berikut :

Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Program:

- Program dengan kategori sangat baik (capaian kinerja 100%) sebanyak 0 program
- Program dengan kategori baik (capaian kinerja 90% - 100%) sebanyak 11 program (rata-rata 96.97%).
- Program dengan kategori cukup baik (capaian kinerja 80% - 90%) sebanyak 1 program (rata-rata 89.54%).
- Program dengan kategori sedang (capaian kinerja 60%- 80%) sebanyak 0 program
- Program dengan kategori gagal (capaian kinerja 0%-60%) sebanyak 0 program

Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan :

- Kegiatan dengan kategori sangat baik (capaian kinerja 100%) sebanyak 44 kegiatan (rata-rata 100%)
- Kegiatan dengan kategori baik (capaian kinerja 90% - 100%) sebanyak 93 kegiatan (rata-rata 97.86%)
- Kegiatan dengan kategori cukup baik (capaian kinerja 80%-90%) sebanyak 2 kegiatan (rata-rata 84.00%)
- Kegiatan dengan kategori sedang (capaian kinerja 60%-80%) sebanyak 4 kegiatan (rata-rata 71.02%).
- Kegiatan dengan kategori gagal (capaian kinerja (0% - 60%) sebanyak 1 kegiatan (rata-rata 53.28%)

Kinerja program dan kegiatan tersebut diiringi dengan Efisiensi dan efektifnya pencapaian target pada ke empat sasaran strategis dengan rata-rata sasaran sebesar 107,23% atau lebih tinggi 0,24% dari tahun sebelumnya, dengan kategori keberhasilan **Sangat Baik**.



Rincian serapan anggaran masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan**
Untuk mewujudkan Sasaran Strategis ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar Rp 1.493.253.550,-, realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis 1 adalah sebesar Rp. 1.475.805.684,- atau 98,83%. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap sangat sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 ini secara keseluruhan 100%.
- 2. Menurunnya Laju Kerusakan Hutan**
Untuk mewujudkan Sasaran Strategis ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar Rp. 8.223.353.094,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis 2 adalah sebesar Rp. 8.010.482.015,- atau 97,41%. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap sangat sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 2 ini secara keseluruhan 99,07%.
- 3. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan**
Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 3 ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar Rp 1.031.780.600,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis 3 adalah sebesar Rp 1.005.389.648,- atau 97,44 % terhadap alokasi dana perubahan. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap sangat sesuai dengan target penyerapan anggaran. Sisa anggaran sebesar Rp 26.390.952,- merupakan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 ini secara keseluruhan 100%.
- 4. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi**
Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 4 ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar Rp 5.159.403.388,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis 4 adalah sebesar Rp 4.868.522.693,- atau 94,36% terhadap alokasi dana perubahan. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana



yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Sisa anggaran sebesar Rp 290.880.695,- merupakan efisiensi pelaksanaan kegiatan dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pemeliharaan rutin peralatan kantor. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 4 ini secara keseluruhan 100%.

Realisasi seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian empat sasaran strategis di atas pada umumnya sudah di atas 90%. Adapun kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 90% adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan dana sebesar Rp 593.439.920,00,- terealisasi Rp 472.200.786,00,- atau 79,57% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp.121.238134,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja telepon Rp.7.235.822,00, belanja air Rp.3.850.950,00, belanja listrik Rp.85.400.569,00 dan belanja kawat/faksimili//internet/VPN Rp.24.751.793,00. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena penyerapan anggaran yang berbeda-beda untuk belanja telepon, belanja air, belanja listrik maupun belanja kawat/faksimili//internet/VPN pada masing-masing UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, tergantung penggunaannya masing-masing yang tidak bisa diprediksi terutama penggunaan belanja listrik.
2. Pemeliharaan rutin peralatan kantor dengan dana sebesar Rp 89.750.000,00,- terealisasi Rp 47.815.000,00,- atau 53,28% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp 41.935.000,00,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp.41.935.000,00. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena sisa pemeliharaan laptop dan komputer berasal dari kebutuhan pemeliharaan peralatan yang dimaksud melebihi dari standard biaya, sehingga tidak bisa dilakukan pemeliharaan dan pemeliharaan peralatan dilakukan sesuai dengan permintaan ASN/Bidang yang menggunakan peralatan.
3. Pembinaan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan industri kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai dengan dana sebesar Rp 5.501.000,00,- terealisasi Rp 4.136.000,00,- atau 75,19% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp. 1.365.000,00,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja alat tulis kantor Rp.275.000,00 dan sisa belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.1.090.000,00. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90%



disebabkan karena untuk sisa belanja alat tulis kantor berasal dari sisa pembelian toner printer dimana harga dalam DPA 2020 sebesar Rp. 1.200.000,- namun di Mentawai dapat dibeli dengan harga Rp. 975.000,- sementara untuk sisa perjalanan dinas dari sisa uang penginapan dan biaya transportasi kapal yang hanya dapat di pertanggung jawabkan sebanyak 1 kali pergi dari tuapejat ke padang. Kelebihan anggaran sebesar Rp. 1.365.000,- merupakan sisa mati kegiatan dan tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan lain.

4. Perencanaan dan pemanfaatan hutan pada wilayah KPH Mentawai dengan dana sebesar Rp 28.777.700,00,-, terealisasi Rp 23.457.700,00,- atau 81,51% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Terdapat sisa dana sebesar Rp. 5.320.000,00,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari sisa belanja perjalanan dinas sebesar Rp.5.320.000,00. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% atau realisasi hanya sebesar 81.51% disebabkan karena terdapat pada sisa uang penginapan dimana standar biaya penginapan Provinsi tidak sesuai dengan biaya penginapan di Mentawai, disamping itu biaya transportasi kapal dalam DPA Tahun 2020 tidak sesuai dengan harga tiket rill kapal antar pulau di Mentawai. Sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 5.320.000,- merupakan sisa mati dan tidak dapat digunakan pada kegiatan lain.
5. Pengelolaan potensi hutan pada wilayah kelola KPH Mentawai dengan alokasi dana besar Rp 15.903.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp 13.753.000,00,- atau 86,48% dengan realisasi fisik 100%. Terdapat sisa dana sebesar Rp. 2.150.000,00,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.2.150.000,- Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% atau realisasi hanya sebesar 86.48% disebabkan karena adanya penggantian dalam melaksanakan perjalanan dinas dari eselon III/IV digantikan oleh staf sehingga terdapat kelebihan pembayaran uang harian, serta sisa dari uang penginapan dimana standar biaya penginapan SAP Provinsi tidak sesuai dengan biaya penginapan di Mentawai, dengan rincian :
 - Uang harian perjalanan dinas sosialisasi dalam daerah DPA telah dianggarkan sebesar Rp. 4.200.000,- (2 Eselon III/IV dan 2 Staf) dengan SPJ sebesar Rp. 4.050.000,- (1 Eselon IV dan 3 Staf) peruntukan 1 eselon diganti oleh staf sehingga pembayaran hariannya berdasarkan standar harian staf. Terdapat kelebihan pembayaran uang harian sebesar Rp. 150.000,-.



- Uang penginapan yang di anggarkan sebesar Rp. 4.000.000,- namun hanya di SPJ kan besar Rp. 2.000.000,- sehingga tersisa Rp. 2.000.000,-. Hal ini dikarenakan standar biaya penginapan di Sipora hanya Rp. 250.000,-. Adanya sisa anggaran sebesar Rp. 2.150.000,- merupakan sisa mati dan tidak mencukupi untuk digunakan untuk kegiatan lain.
6. Monitoring dan evaluasi operasional dan penanganan pasca kebakaran hutan dana sebesar Rp 125.609.000,00,- terealisasi sebesar Rp 87.027.700,00,- atau 69,28% dengan realisasi fisik 75%. Terdapat sisa dana sebesar Rp.38.581.300,00,- merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja bahan bakar minyak Rp.5.236.300,- dan sisa belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.33.345.00,-. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% atau realisasi hanya sebesar 69.28% disebabkan karena sisa anggaran merupakan anggaran untuk penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, sementara volume kejadian kebakaran hutan dan lahan kecil sehingga personil yang diturunkan untuk biaya perjalanan dinas menjadi berkurang. Dapat disimpulkan kegiatan ini bersifat situasional dan kegiatannya dapat direalisasikan sesuai dengan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan.
 7. Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan dengan dana sebesar Rp 125.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp 75.060.200,00,- atau 60,05% dengan realisasi fisik 65%. Terdapat sisa dana sebesar Rp.49.939.800,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari belanja bahan bakar minyak Rp.3.994.800,00, belanja jasa buruh/tukang/mandor Rp.14.500.000,00, belanja makanan dan minuman kegiatan Rp2.275.000,00 dan sisa belanja perjalanan dinas sebesar Rp.29.170.000,00. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% atau realisasi keuangan sebesar 60.05% disebabkan karena kegiatan ini bersifat situasional , dimana kejadian volume kebakaran hutan dan lahan kecil sehingga target pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan lebih kecil dibandingkan dengan yang dianggarkan, sehingga komponen belanja lainnya juga tidak dapat direalisasikan.

Tujuh kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90% tersebut secara garis besar tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan capaian kinerja Dinas Kehutanan Sumatera Barat, dimana sampai akhir Tahun Anggaran 2020 terlihat realisasi keuangan pada instansi mencapai 98,33% dan realisasi pada pencapaian sasaran strategis mencapai 107,23% atau tergolong dalam kriteria **Sangat Baik**.



BAB IV. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maupun Perjanjian Kinerja tahun 2020 merupakan dasar Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas, tanggungjawab, dan amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan.

Atas dasar tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai yang diamanatkan, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.

Perbaikan sistem AKIP yang telah dilakukan terhadap lima komponen sistem AKIP adalah:

1. Perencanaan Kinerja

- Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen Renstra dengan menyesuaikan dokumen revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan revisi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2019.
- Pemutakhiran Sistem Operasional Prosedur (SOP) sesuai hasil evaluasi SOP yang dilakukan oleh auditor internal Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan auditor eksternal.

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi indikator kinerja setiap 3 bulan sekali.

3. Pelaporan Kinerja

- Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan realisasi kinerja dan anggaran bulanan APBD dan APBN tepat pada waktunya sebagai dasar untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan.
- Sebelum menyusun laporan bulanan APBD dan APBN dilakukan rekonsiliasi data realisasi keuangan antara Subbag Keuangan dan Subbag Program



Anggaran sehingga data realisasi keuangan dalam laporan bulanan APBD dan APBN sama dengan data realisasi keuangan dalam LRA.

- Melalui Nota Dinas Kepala Dinas meminta untuk seluruh unit kerja menyusun Laporan Kinerja.
4. Evaluasi Kinerja
- Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dalam bentuk rapat monev bulanan, audit internal, tinjauan manajemen, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
 - Melakukan expose kinerja oleh masing-masing eselon III yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
 - Melakukan *reward* dan *punishment* terkait kinerja setiap unit kerja.
5. Capaian Kinerja
- Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil audit/evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya agar tidak berulang kembali di tahun 2021.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2020 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat seluruh kendala dan hambatan dapat diminimalisir sehingga mendapatkan solusi pemecahannya. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum **Sangat Baik** memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* bidang kehutanan sebagai bagian integral dari pembangunan kehutanan itu sendiri, seperti terlihat pada Tabel 48.



Tabel 48. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020

SASARAN	JUMLAH IKU	CAPAIAN SASARAN (%)
<i>Sasaran 1</i>	<i>2</i>	<i>99,38</i>
<i>Sasaran 2</i>	<i>1</i>	<i>105,28</i>
<i>Sasaran 3</i>	<i>1</i>	<i>119,74</i>
<i>Sasaran 4</i>	<i>1</i>	<i>104,53</i>
<i>Rata-rata</i>	<i>5</i>	<i>107,23</i>

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih adanya konflik kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan secara operasional masih terkendala dengan peta dasar yang tersedia, masih ada tumpang tindih dan *non prosedural* perizinan.
2. Lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang kejahatan kehutanan (perambahan, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan).
3. Penganggaran dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan belum memperhitungkan proyeksi cuaca dan peta rawan kebakaran, sehingga kurang optimal dalam serapannya.
4. Belum efektifnya penguatan kelembagaan terhadap lembaga/kelompok perhutanan sosial yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan sehingga upaya menjalin kerjasama pengembangan perhutanan sosial dengan lembaga/instansi terkait, Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan kalangan Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swasta) belum optimal.
5. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

1. Melakukan identifikasi konflik tenurial, melakukan identifikasi, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di Kab/Kota;
2. Peningkatan peran, kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kejahatan bidang kehutanan.



3. Penggunaan teknologi, pemantauan prediksi cuaca serta penyusunan peta rawan kebakaran digunakan sebagai dasar perencanaan penganggaran dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
4. Mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi/lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh kehutanan yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kinerja perhutanan sosial.
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya Kami berharap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada jenjang institusi yang lebih tinggi serta dapat memberikan data/informasi kepada *stakeholders* yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat sehingga tujuan “hutan lestari dan masyarakat sejahtera” dapat terwujud.





LAMPIRAN





**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Raden Saleh No 8A Padang